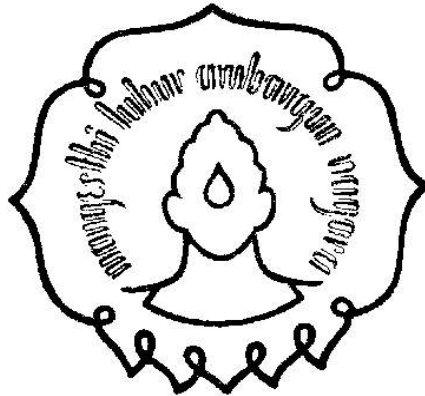


**SOSIALISASI PROGRAM GERAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
AGROPOLITAN (GPKA) KEPADA PETANI  
DI KABUPATEN BOYOLALI**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Pertanian  
di Fakultas Pertanian  
Universitas Sebelas Maret**

**Jurusan/Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian**



**Oleh :**

**Yanuarti Hapsari**

**H0404068**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2009**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SOSIALISASI PROGRAM GERAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
AGROPOLITAN (GPKA) KEPADA PETANI  
DI KABUPATEN BOYOLALI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**YANUARTI HAPSARI**

H0404068

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua**

**Anggota I**

**Anggota II**

Dr. Ir. Suwanto, MSi  
NIP.131 281 878

Ir. Sutarto, MSi  
NIP.080 063 298

Dr. Ir. Eny Lestari, MSi  
NIP.132 164 108

Surakarta,     September 2009

Mengetahui

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, MS  
NIP. 19551217 198203 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, MS selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Ir. Suwanto, MSi selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ir. Sutarto, MSi selaku Pembimbing Pendamping skripsi.
3. Ibu Dr. Ir. Eny Lestari, MSi selaku anggota II tim penguji skripsi.
4. Bapak Ir. Eko. AS selaku Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Usahatani di DISPERTANBUNHUT Kabupaten Boyolali.
5. Bapak Ir. Tri Hartoyo selaku staf Kantor Ketahanan Pangan Kab. Boyolali.
6. Bapak Gunawan selaku staf di Bappeda Kabupaten Boyolali.
7. Bapak Ir. Soemin selaku Koordinator BPP Ampel.
8. Ibu Sukarni selaku PPL di BPP Boyolali.
9. Ketua GAPOKTAN masing-masing Kecamatan Ampel dan Boyolali.
10. Kedua orang tua ku yang telah memberi semangat dan kepercayaan.
11. Rekan-rekanku angkatan 2004, kakak tingkatku angkatan 2002 dan 2003.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini kurang sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surakarta,     September 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>SUMMARY</b> .....	x
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	6
B. Kerangka Berfikir .....	18
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Disain Penelitian .....	21
B. Penentuan Lokasi Penelitian .....	22
C. Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan) .....	23
D. Jenis Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Validitas Data .....	29
G. Metode Analisis Data .....	30

#### **IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

A. Keadaan Alam.....	34
B. Keadaan Penduduk.....	37
C. Keadaan Pertanian.....	44

#### **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali.....	50
1. Pentahapan Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali.....	57
2. Keanggotaan Tim Pembina Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali.....	60
B. Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA).....	66
1. Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel .....	66
2. Hasil Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel.....	70
3. Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali .....	71
4. Hasil Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali.....	74
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) .....	76
D. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) .....	79

#### **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Judul	Halm
Tabel 1	Tataguna Lahan di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006.....	36
Tabel 2	Keadaan Penduduk Menurut Umur di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006.....	38
Tabel 3	Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006 .....	40
Tabel 4	Keadaan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006 .....	41
Tabel 5	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006 .....	43
Tabel 6	Luas Panen dan Produksi Sayur-sayuran di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006 .....	45
Tabel 7	Produksi Buah-buahan di Kecamatan Ampel Tahun 2006 .....	46
Tabel 8	Produksi Buah-buahan di Kecamatan Boyolali Tahun 2006 .....	47
Tabel 9	Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Ampel Tahun 2006.....	48
Tabel 10	Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Boyolali Tahun 2006.....	49
Tabel 11	Target dalam Program GPKA di Kabupaten Boyolali Tahun 2006.....	58
Tabel 12	Susunan Tim Pembina Program GPKA Tahun 2008.....	61
Tabel 13	Jenis Investasi dalam Bidang Agroindustri Tahun 2007.....	63

## DAFTAR GAMBAR

	Judul	Halm
Gambar 1	Kerangka Berpikir Sosialisasi Program GPKA kepada Petani di Kabupaten Boyolali.....	21
Gambar 2	Triangulasi Data (sumber).....	31
Gambar 3	Model Analisis Interaktif .....	32
Gambar 4	Skema Program GPKA .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

	Judul	Halm
Lampiran 1	Kerangka Konseptual .....	84
Lampiran 2	Tabulasi Data.....	86
Lampiran 3	Pedoman Wawancara .....	98
Lampiran 4	Pedoman Observasi .....	104
Lampiran 5	Foto di Lapang .....	106
Lampiran 6	Surat Ijin Survey.....	109
Lampiran 7	Peta Kabupaten Boyolali.....	110



## RINGKASAN

Yanuarti Hapsari, H0404068. "SOSIALISASI PROGRAM GERAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN (GPKA) KEPADA PETANI DI KABUPATEN BOYOLALI." Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Suwanto, MSi dan Ir. Sutarto, MSi.

Pembangunan pedesaan pada daerah-daerah pemasok hasil produksi pertanian perlu lebih dimantapkan agar memiliki ketahanan yang lebih kuat karena kawasan pedesaan merupakan daerah tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam pengembangan bidang pertanian di pedesaan maka diperlukan terobosan program yang dilakukan secara terarah dan terkoordinasi. Salah satu program tersebut adalah Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA). Konsep agropolitan ini pada dasarnya adalah membangun fungsi kota pertanian dan kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA), mengetahui kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA), dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) yaitu di Kabupaten Boyolali. Dari Kabupaten Boyolali dipilih 2 kecamatan yaitu Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* (sengaja) dan *snowball sampling* (teknik bola salju). Jenis sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa/aktivitas, serta sumber tertulis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan *content analysis*. Untuk mengukur validitas data menggunakan triangulasi data (sumber). Analisis data yang digunakan ialah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program GPKA dilakukan melalui penyuluhan/pertemuan antara kelompok tani/GAPOKTAN, PPL, dan dinas terkait, pelatihan, dan pendampingan. Kendala yang dihadapi yaitu jumlah personil yang dilibatkan terbatas, adanya mutasi salah satu staf Seksi Agribisnis, tidak semua petani mengetahui tentang Program GPKA, keterbatasan dana untuk kegiatan program GPKA, aktivitas petani, dan petani belum seluruhnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap GPKA. Upaya yang dilakukan adalah mengkoordinasi jumlah personil yang akan dilibatkan, membuat proposal pelaksanaan GPKA, dan memberi masukan untuk menunda kepindahan staf bersangkutan, bertukar informasi kepada petani lain, dan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan pendampingan.

## SUMMARY

Yanuarti Hapsari, H0404068. "SOSIALIZATION GERAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN (GPKA) PROGRAM TO THE FARMER IN REGENCY OF BOYOLALI". AGRICULTURE FACULTY IN SEBELAS MARET SURAKARTA OF UNIVERCITY 2009. Under the guidance Dr. Ir. Suwanto, MSi and Ir. Sutarto, MSi.

Developing of village on the agricultural production district needed more stablied in order to have powerful divence because the village district is a big place for Indonesian people. In developing agriculture sector on the village need inovatif program which is directed and coordinated. One of the program is Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) Program. The concept this agropolitan basicall is built fungtion agropolitan and that area gaving the big contribution to the job and community's welfare.

The aimed of this research is to know how the socialization Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) Program, knowing constraint delayed on socialization Movement Development Program of Agropolitan Dictrict (SMAD), and knowing the way of socialization Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) Program Regency of Boyolali.

The method are used is kualitative with descriptive approach. Location of this research used purposive ways that on Regency of Boyolali. From Regency of Boyolali was chosen two subdistrict, that is subdistrict of Ampel and Boyolali. The informan are used with purposive ways and snowball sampling. The sources data its come from the informan, place and activities and also document/archieve. Whereas the technique to collected data had done with interview, observation, and content analysis. To measure of data used triangulation data (sources). The data was analysed by using reduction data, saw data, and verification.

The result of this research showing that The Sosialization Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) Program had done with elucidation/companionship with group farmer/GAPOKTAN, PPL, and official related, training, and contiguous. Constraint that fight are amount personil in concerned stint, presence either one staf section Agribisnis mutation, the farmer not all known about the GPKA program, cost limit for activity GPKA program, the farmer activity, and the farmer whole lot have same view and attitude about GPKA. The way used are coordinating amount personil in concerned, giving suggestion to tow removal the staf involved, the change information with farmer other, make proposal for GPKA Program, and coordination across sector intensived and contiguous.

## I. PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Basis pembangunan pertanian adalah pembangunan pedesaan karena kawasan pedesaan merupakan daerah tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2006, diketahui kurang lebih 54% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan (Rustiadi dan Sugimin Pranoto, 2007). Oleh karena itu, pembangunan pedesaan perlu lebih dimantapkan agar memiliki ketahanan yang lebih kuat. Mengingat pentingnya fungsi daerah pedesaan terutama dalam hal penyedia bahan pangan untuk penduduk, penyedia tenaga kerja untuk pembangunan, penyedia bahan baku untuk industri dan penghasil komoditas untuk diekspor ke luar negeri (Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, 2008).

Menyikapi berbagai tantangan (misalnya pemasaran hasil, pengelolaan tanaman) dan ancaman (misalnya bencana alam) dalam pengembangan bidang pertanian di pedesaan maka diperlukan terobosan program yang melibatkan berbagai pihak yang perlu dilakukan secara terarah dan terkoordinasi. Salah satu program tersebut adalah Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA).

Konsep agropolitan pada dasarnya adalah sebuah gerakan untuk kembali membangun desa. Desa yang baik idealnya harus bisa menjadi suatu tempat yang nyaman, aman dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Konsep agropolitan ini basisnya pada membangun fungsi kota pertanian dalam artian luas. Dimana pertanian itu tidak dilihat dari sisi bercocok tanam dan mencangkul saja (Rustiadi, 2006). Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan

terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan.

Kota pertanian (agropolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) dan kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan pertanian tersebut (termasuk kotanya) disebut dengan kawasan agropolitan. Kota pertanian dapat merupakan kota menengah atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota pedesaan atau kota nagari. Fungsi kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa *hinterland* atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha pertanian (*on farm dan off farm*), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan. Menurut Ernan Rustiadi (2006) dalam melaksanakan konsep agropolitan ada dua faktor yang menghambat berjalannya konsep itu. Pertama adalah kesulitan SDM (Sumber Daya Manusia) dan yang kedua tidak jelasnya pengorganisasian.

Program GPKA sudah ada sejak tahun 2003 dan sempat fakum pada tahun 2006-2007. Sebelumnya program tersebut ditangani oleh Dinas Pertanian kemudian diserahkan kepada Kantor Ketahanan Pangan sebagai pelaksanaannya dan pada tahun 2008 mulai dikembangkan lagi. Untuk mengatasi kevakuman tersebut maka perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya sehingga para petani dan masyarakat luas mengetahui akan pentingnya Program GPKA tersebut. Proses sosialisasi ini perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Boyolali bermata pencaharian sebagai petani dan selebihnya adalah wiraswasta maupun pegawai negeri. Untuk menunjang usahatani masyarakat Boyolali, pemerintah setempat mencanangkan Program GPKA (Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan) agar kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

Program GPKA ini dilaksanakan di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cepogo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Selo, dan Kecamatan Boyolali atau biasa disingkat dengan nama “GOASEBO”. Implikasi yang penting untuk mengembangkan program agropolitan ialah pembentukan rasa kebersamaan dalam klaster desa-desa yang tercakup dalam wilayah agropolitan. Menurut Agusta (2008) Untuk melaksanakan kegiatan ini, keberadaan saluran irigasi, pasar, jalan dan jembatan bisa digunakan untuk mengembangkan simpul-simpul kebersamaan warga desa-desa klaster, dalam rangka memelihara dan meningkatkan fasilitas fisik, serta mengembangkan dan mempertahankan keuntungan warga desa secara berkesinambungan.

Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Boyolali mengenai Program GPKA (Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan) dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani kendala tersebut.

### **Perumusan Masalah**

Program GPKA (Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan) merupakan suatu program pemerintah daerah Boyolali dengan menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai salah satu kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Boyolali dimana para petani adalah sebagai sasarannya.

Pembangunan kawasan agropolitan (pedesaan) merupakan hal yang perlu dijalankan. Hal ini bukan hanya karena terdapatnya ketimpangan antara kawasan pedesaan dengan perkotaan akan tetapi juga mengingat tingginya potensi di kawasan pedesaan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong keberhasilan pembangunan.

Program GPKA ini melibatkan penyuluh, kelompok tani/gapoktan, tokoh masyarakat dan dinas terkait. Program GPKA sempat mengalami kevakuman pada tahun 2006-2007 karena ada beberapa kendala, sebelumnya program tersebut ditangani oleh Dinas Pertanian kemudian diserahkan kepada Kantor Ketahanan Pangan sebagai pelaksananya. Demi menunjang keberhasilan/kelanjutan program tersebut maka perlu adanya sosialisasi yang dikhususkan kepada para petani di Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2008 Program GPKA ini mulai dihidupkan lagi dan diharapkan semua petani dapat berperan aktif di dalamnya.

Wujud peran aktif masyarakat Boyolali dalam tahap sosialisasi ini adalah masyarakat dapat membuat usulan-usulan yang merupakan permasalahan di lapangan (misalnya tentang keterbatasan sarana prasarana, petani mengusulkan untuk menambah jumlah alsintan) dan selanjutnya dapat diindikasikan sebagai program yang perlu ditindaklanjuti. Tahapan ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan identifikasi permasalahan, semakin aktifnya masyarakat diharapkan permasalahan yang teridentifikasi semakin dapat menggambarkan kondisi lapangan.

Sosialisasi dapat dilakukan antara lain melalui penyuluhan pertanian yakni berupa pengenalan dan penjelasan yang terkait dengan program. Proses sosialisasi Program GPKA tersebut ternyata tidak berjalan dengan mulus, ada kendala yang dihadapi. Untuk itu, peneliti perlu mengkaji secara mendalam kendala yang dihadapi tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut  
Bagaimanakah sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali?

Apa saja kendala yang dihadapi dalam sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali?

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali?

## **Tujuan Penelitian**

Selaras dengan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali

## **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret
2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dalam bidang pertanian yang terkait dengan penelitian ini
3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan penelitian sejenis

## II. LANDASAN TEORI

### Tinjauan Pustaka

#### 1. Pembangunan Pertanian

Menurut Hadisapoetro *dalam* Sajogyo (1982) tugas pokok pemerintah di dalam pembangunan pertanian adalah membimbing para petani agar mereka mampu dan bersedia untuk meningkatkan produksinya. Membimbing berarti menciptakan suatu keadaan/ suatu iklim pembangunan yang baik, sehingga para petani mampu dan bersedia untuk melaksanakan peningkatan produksi usaha taninya yang sekaligus dapat meningkatkan taraf hidupnya. Di dalam menciptakan iklim pembangunan pertanian yang baik, maka di samping kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan pada tingkat pusat, perlu dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan di tingkat pedesaan untuk dapat menjamin bahwa apa yang dilakukan pada tingkat pusat dapat sungguh-sungguh dimanfaatkan oleh para petani. Ada 4 jenis kegiatan yang perlu dilaksanakan di tingkat pedesaan, yaitu

- a. Percobaan dan penyuluhan
- b. Penyaluran saprodi
- c. Penyediaan kredit
- d. Pemasaran dan pengolahan

Kemampuan individu perlu terus diasah seiring kemajuan IPTEK. Kemampuan ini diarahkan pada kemandirian petani dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pertaniannya. Semangat kerjasama baik secara vertikal maupun horisontal (sesama petani) juga perlu dipupuk sehingga keberhasilan dapat dicapai secara bersama-sama (Solahuddin, 1999).

Daya kreasi dalam membangun IPTEK pertanian masa depan sangatlah diperlukan. Hal ini penting untuk membangun citra pertanian yang selama ini terkesan gurem dan serba kurang menarik dibandingkan



dengan sektor formal lainnya. Citra semacam ini harus mulai dirubah dengan mengesankan bahwa pertanian itu indah, unik, penting, dan serba menguntungkan baik bagi kehidupan sehari-hari maupun bagi kegiatan ekonomi bisnis (Solahuddin, 1999).

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan pertanian adalah usaha untuk memperbaiki bidang pertanian ke arah yang lebih baik. Usaha tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat desa. Kemampuan individu juga perlu diasah seiring perkembangan IPTEK agar bidang pertanian lebih berkembang.

## 2. Komunikasi

Menurut Book *dalam* Cangara (2005) berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Sedangkan menurut Rogers dan D. Laurence Kincaid *dalam* Cangara (2005) komunikasi diartikan sebagai suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Komunikasi informal ternyata seringkali lebih efektif daripada komunikasi formal jika itu berada dalam percakapan orang dengan orang secara langsung. Mengenai pentingnya komunikasi informal, Stoop (1988) *dalam* Tjitropranoto dan Mahyuddin S (1989) mengusulkan bahwa komunikasi informal sebaiknya diperlakukan sebagai unsur kelengkapan daripada sebuah pengganti untuk komunikasi formal atau hubungan.

Di dalam proses komunikasi unsur “arus balik” merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauhmana pesan komunikasi mendapatkan respon dari khalayak sasaran. Bila pesan dalam komunikasi mendapat tanggapan dari khalayak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang

disampaikan tersebut telah mencapai sasaran karena pesan yang diterima dapat dimengerti dan dipahami (Suprpto dan Fahrianoor, 2004).

Karakteristik komunikasi yang penting adalah bahwa orang lain menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Jika beberapa orang menerima pesan yang disampaikan berarti komunikasi berjalan dengan baik, namun jika pesan tidak mampu diterima oleh orang lain maka dapat dikatakan bahwa komunikasi berjalan kurang baik (Brooks, 1971). Seperti yang diungkapkan oleh H.A.S. Moenir (2000) *dalam* Yusroni (2005) semua kegiatan untuk menyampaikan pesan berisi berbagai hal krusial berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh lembaga dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari cara komunikasi langsung atau melalui media perantara.

Menurut uraian yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli terkait tentang komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi/pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media. Agar komunikasi berjalan efektif maka antara komunikator dan komunikan harus memiliki kesepahaman makna dalam pesan yang disampaikan.

### 3. Sosialisasi

Yusroni (2005) mendefinisikan sosialisasi sebagai upaya menyebarluaskan informasi baik berupa ide, gagasan, himbuan, bahkan produk tertentu yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga atau badan yang bersifat sama. Setiap individu dalam masyarakat pada dasarnya akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu berada.

Menurut Soe'oad *dalam* Ihromi (1993) sosialisasi merupakan proses transmisi kebudayaan antar generasi, karena tanpa sosialisasi masyarakat tidak dapat bertahan melebihi satu generasi. Dalam hal ini syarat penting dalam sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial, sosialisasi tidak mungkin berlangsung. Menurut Gumilar (2008)

Keseluruhan kebiasaan yang dimiliki manusia (di bidang ekonomi, kekeluargaan, pendidikan, agama, politik, dan sebagainya) harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat melalui proses yang dinamakan sosialisasi.

Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program (UN HABITAT, 2009). Menurut Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten Boyolali (2006) sosialisasi dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat petani tentang kebutuhan sarana dan prasarana pertanian, baik yang menunjang produktivitas maupun pemasaran.

David F. Aberle *dalam* Michael Rush dan Philip Althoff (2005) menjelaskan definisi awal mengenai sosialisasi yaitu pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu ketrampilan-ketrampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi...(dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.

Menurut S.N. Eisentadt *dalam* Michael Rush dan Philip Althoff (2005) mengatakan bahwa sosialisasi adalah komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. Lain halnya dengan Irvin L. Child *dalam* Michael Rush dan Philip Althoff (2005) yang menyatakan sosialisasi adalah segenap proses dengan apa individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima individu sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman/transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok/masyarakat (Gumilar, 2008). Sedangkan proses sosialisasi menurut Peter Berger *dalam* Gumilar (2008) merupakan proses melalui mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat yang saling berinteraksi dan bertukar informasi.

Menurut Nasution (2004) sosialisasi juga merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial dan segala sesuatu yang dipelajari individu harus dipelajari dari anggota masyarakat lainnya. Sosialisasi terjadi melalui *conditioning* oleh lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental seperti berbahasa, cara berjalan, berkelakuan sopan, mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat.

Mas Roro Lilik Ekowati *dalam* Yusroni (2005) menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan sosialisasi, antara lain

- a. Bahwa proses pelaksanaan sosialisasi harus dimulai dari para komunikator dan kemudian berlanjut pada audiens yang sesuai dengan kepentingan informasi yang akan disampaikan
- b. Melalui sosialisasi internal dikalangan komunikator akan diketahui personil yang tepat untuk melaksanakan tugas, lokasi tempat tugas tersebut dilaksanakan, dan kepada siapa sosialisasi harus dilakukan
- c. Dalam proses itu pula harus secepatnya diketahui apakah audiens merespon informasi yang disampaikan secara positif ataukah sebaliknya, dengan temuan data ini maka komunikator akan mampu mengambil kebijakan antisipatif atas hasil tersebut

Vembriarto (1982), menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah

- a. Proses belajar, yaitu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup dan kebudayaan masyarakatnya.

- b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai dan standar tingkah laku dalam masyarakat dimana dia hidup.
- c. Semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Beberapa segi penting tentang sosialisasi menurut Rush dan Althoff (2005) yaitu

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman atau pola-pola aksi.
- b. Sosialisasi memberikan indikasi umum tentang hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap, tidak hanya berurusan dengan tingkah laku kelompok dimana individu tersebut menjadi bagian daripadanya.
- c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi sampai pada usia kanak-kanak dan masa remaja saja (sekalipun pada usia tersebut merupakan periode yang paling penting dan berarti), akan tetapi sosialisasi itu tetap berlanjut sepanjang kehidupan atau merupakan pra kondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

Gumung Gumilar (2008) membedakan tipe sosialisasi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Pada tipe formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, misalnya pendidikan di sekolah.. Sedangkan pada tipe informal terdapat di masyarakat/dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman/sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi seseorang agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Menurut Gumgum Gumilar (2008) pola sosialisasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu

- a. Sosialisasi Refresif (*refressive socialization*), menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan, seperti penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, non verbal dan berisi perintah, penekanan titik berat sosialisasi pada orang tua dan pada keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*.
- b. Sosialisasi Partisipatoris (*Participatory Socialization*), merupakan pola yang di dalamnya seseorang diberi imbalan manakala berperilaku baik; hukuman dan imbalan bersifat simbolik; seseorang diberi kebebasan; penekanan diletakan pada interaksi; komunikasi bersifat lisan; seseorang menjadi pusat sosialisasi; keperluan seseorang dianggap penting; keluarga menjadi *generalized other*.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam penyuluhan Program GPKA meliputi 3 kegiatan yaitu

- a. Perkenalan dan penjelasan merupakan kegiatan pertama kali yang dilakukan. Kegiatan ini menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan program, misalnya tujuan dan manfaat kegiatan bagi masyarakat.
- b. Pejelasan pemberdayaan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui stimulus kegiatan pembangunan fisik, dengan menjelaskan kedudukan fungsi dan kedudukan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana.
- c. Diskusi/tukar informasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakat tentang kondisi, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

(Departemen pekerjaan Umum, 2006).

Berbagai teori tentang sosialisasi telah dikemukakan di atas. Peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi hampir sama dengan pengertian komunikasi, yaitu penyebarluasan informasi (berupa ide, gagasan, peraturan, kebijakan, program) dari satu pihak ke pihak lain tetapi dalam sosialisasi biasanya dilakukan oleh suatu badan/lembaga tertentu dan disampaikan kepada khalayak. Isi informasi terkait program yang dilakukan dan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai.

#### 4. Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA)

Secara harfiah, agropolitan (*agro* = pertanian ; *politian* = kota) adalah kota pertanian yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Hamenda, 2003).

Kawasan agropolitan merupakan kawasan pedesaan yang secara fungsional merupakan kawasan dengan kegiatan utama adalah sektor pertanian. Dengan demikian penetapan tipologi kawasan agropolitan harus memperhatikan : (1) pengertian sektor pertanian ini adalah dalam artian luas meliputi beragam komoditas yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan; (2) kawasan agropolitan bisa pula dilihat dari persyaratan agroklimat dan jenis lahan, sehingga bisa pula dibedakan dengan pertanian dataran tinggi, pertanian dataran menengah, pertanian dataran rendah, serta pesisir dan laut; (3) kondisi sumberdaya manusia, kelembagaan dan kependudukan yang ada juga menjadi pertimbangan; (4) aspek posisi geografis kawasan agropolitan; dan (5) ketersediaan infrastruktur (Rustiadi dan Sugimin Pranoto, 2007).

Agropolitan terdiri dari dua kata yaitu *agro* dan *politian* (*polis*). *Agro* berarti pertanian dan *politian* berarti kota, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sedangkan yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik,

menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Rivai, 2003).

Tujuan akhir dari Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan antara desa dan kota (Subdin Bimas Ketahanan Pangan dan Usahatani Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, 2007).

Menurut John Hamenda (2003) Pengembangan kawasan agropolitan terdapat 3 hal penting yang menjadi syarat agar konsep pengembangan kawasan agropolitan dapat diwujudkan, yaitu

**a. Investasi dalam bidang Agroindustri**

Kawasan atau daerah yang disebut sebagai daerah agropolitas dan agropolitan yang berbasis komoditas unggulan adalah suatu daerah yang bertumpu dari hasil pertanian dan memiliki komoditas unggulan. Daerah tersebut tidak saja menjadi pemasok dari komoditas unggulan yang dihasilkan, tetapi juga menghasilkan sesuatu produk olahan dari produksi pertanian yang siap dipasarkan dan menjadi ciri khas daerahnya.

**b. Promosi Produk Unggulan**

Promosi produk unggulan dari suatu kawasan akan menentukan keberhasilan pengembangan daerah agropolitan yang bersangkutan.

**c. Pengelolaan Agrikultura dan Industri yang Berkesinambungan**

Dalam kawasan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai kawasan agropolitan dibangun sebuah industri yang menggunakan bahan baku atau *raw* material dari produk pertanian yang ada di daerah tersebut akan menjadi satu daerah yang penghasilannya berkesinambungan dengan produk itu sendiri dan masyarakat petani akan menikmati kesejahteraan sebagai dampak pembangunan. Kesejahteraan yang diangkat dari hasil produksi pertanian mereka yang diserap oleh industri tersebut disinilah satu kota atau suatu kawasan



agropolitan akan dikenal, karena komoditas produk unggulan dari kawasan itu sendiri.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa GPKA (Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan) merupakan suatu gerakan untuk membangun kembali desa agar lebih berkembang. Tiga hal penting yang menjadi syarat agar konsep pengembangan kawasan agropolitan adalah investasi dalam bidang agroindustri, promosi produk unggulan, serta pengelolaan agrikultura dan industri yang berkesinambungan. Adapun tujuan dari GPKA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani.

#### 5. Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian ialah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya (Kartasapoetra, 1987).

Penyuluhan pertanian dapat juga diartikan sebagai suatu sistem pendidikan, yang dalam prakteknya juga mempergunakan cara-cara lainnya seperti peniruan, pembujukan dan propaganda. Cara peniruan banyak dipergunakan dalam usaha-usaha penyuluhan pertanian seperti dalam penyelenggaraan berbagai macam demonstrasi atau percontohan. Karena petani itu biasanya lebih mudah mau meniru teman sedesannya yang berhasil, maka para petugas penyuluhan pertanian sering meminta bantuan petani-petani maju untuk menjadi contoh atau teladan bagi teman-temannya (Wiraatmadja, 1973).

Mardikanto (2001) mengungkapkan bahwa penyuluhan pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif. Adanya penyuluhan pertanian mendorong terjadinya perubahan perilaku pada diri semua *stakeholder* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses

pembangunan. Menurut Ibrahim (2003) kegunaan dari adanya program penyuluhan pertanian antara lain: 1) adanya dokumen tertulis yang berarti dapat digunakan setiap waktu, 2) adanya kelangsungan pelaksanaan program, meskipun terjadi penggantian personalia, 3) adanya tujuan yang jelas yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan, 4) apabila petani diikutsertakan dalam merencanakan program, berarti akan dirasakan oleh petani akan kemanfaatan dari program tersebut, 5) dengan ikut sertanya petani dalam kegiatan perencanaan berarti menambah pengalaman petani dan kegiatan bersifat mendidik karena petani belajar menetapkan kepentingan dan masalah yang sebelumnya tidak mereka rasakan, 6) ikutsertanya petani di dalam kegiatan perencanaan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pada diri mereka sendiri dan sifat kepemimpinannya.

Filsafat dan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian menurut Deptan (1978) diantaranya sebagai berikut:

Keinginan, kemampuan, kesanggupan untuk maju secara potensi ada pada petani; kebijaksanaan, suasana, fasilitas yang menguntungkan akan menimbulkan kegairahan petani untuk berikhtiar.

Petani tidak bodoh, tidak konservatif; petani mampu belajar dan sanggup berkreasi.

Belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif; apa yang dikerjakan atau dialami sendiri akan berkesan dan melekat pada diri petani dan menjadi kebiasaan baru.

Belajar melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah praktis kebiasaan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik akan menjadikan petani seseorang yang berinisiatif dan berswadaya.

Berperanan dalam kegiatan-kegiatan menimbulkan kepercayaan diri sendiri, program pertanian untuk petani dan oleh petani akan menimbulkan partisipasi masyarakat tani yang wajar.

Sasaran penyuluhan pertanian pada dasarnya adalah penerima manfaat atau *benefacaries* pembangunan pertanian, yang terdiri dari individu atau kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan pertanian. Petani dalam hal ini merupakan sasaran utama dari penyuluhan pertanian (Mardikanto dan Arip Wijianto, 2005).

Menurut tingkatannya, tujuan penyuluhan pertanian dapat dibedakan mengenai:

Tujuan dasar yaitu tujuan akhir yang seharusnya terjadi di dalam masyarakat, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat petani dan masyarakat secara keseluruhan pada umumnya.

Tujuan umum yang sudah agak jelas, seperti perubahan sikap, keterampilan dan pengetahuan demi meningkatnya produksi dan pendapatan petani.

Tujuan kerja atau tujuan operasional yaitu tujuan yang jelas dan dipergunakan sebagai pedoman atau arah kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan.

Dalam hal ini penyuluhan pertanian mempunyai tujuan ganda, bagi penyuluhnya sendiri dan bagi petani dan lembaga-lembaga pelayanan yang berkaitan dengan usahatani. Bagi penyuluhnya sendiri, dimaksudkan agar mereka mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengorganisir petani di wilayah kerja masing-masing. Bagi petani, dimaksudkan agar mereka dapat memperoleh kenaikan produksi dan pendapatan. Sedang bagi lembaga-lembaga pelayanan yang berhubungan dengan usahatani, dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan dan kemudahan yang lebih memungkinkan petani untuk menerapkan teknik baru yang disuluhkan (Mardikanto dan Sutarni, 1982).

Keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dipengaruhi dan berhubungan erat dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bidang-bidang lain, seperti : (1) kegiatan penelitian (*research*), yang menghasilkan teknologi baru, (2) kegiatan pelayanan (*service*), yang berperan dalam

penyediaan saprodi (pupuk, pestisida, dan lain-lain) membantu dalam perolehan usaha tani, (3) kegiatan pengaturan (*regulation*), yang berperan dalam hal peraturan-peraturan, izin usaha, pengendalian harga dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, (4) pembinaan masyarakat, dalam hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dukungan dan pendapat umum terhadap pembangunan pertanian. Oleh karenanya penyuluhan pertanian haruslah dilakukan secara akrab serta serasi dan bekerjasama antar kelembagaan baik pemerintah, maupun swasta, antar penyuluh pertanian dan keluarga tani dan antar petani itu sendiri, yang ruang lingkupnya meliputi pembudidayaan yang lebih baik (*Better Farming*), pengelolaan usaha tani-nelayan yang lebih menguntungkan (*Better Bussines*) dan kehidupan yang lebih sejahtera (*Better Living*) (Saptaji, 2008).

Berbagai ahli di atas telah menyampaikan tentang pengertian penyuluhan pertanian. Berdasarkan semua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluhan pertanian merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian harus dilakukan secara akrab, serasi dan bekerjasama antar kelembagaan baik pemerintah, maupun swasta, antar penyuluh pertanian dan keluarga tani dan antar petani itu sendiri.

## **Kerangka Berpikir**

Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program (UN HABITAT, 2009). Dalam hal ini sosialisasi yang akan dikaji tertuju pada sosialisasi Program GPKA (Gerakan

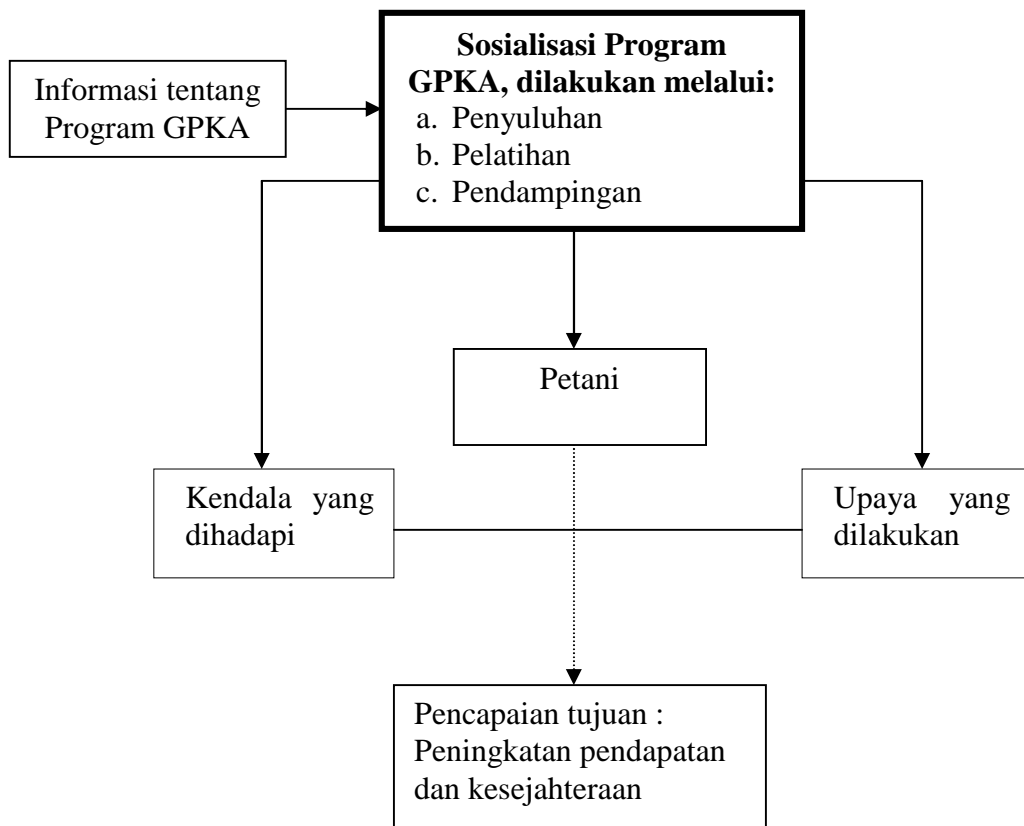
Pengembangan Kawasan Agropolitan) di Kabupaten Boyolali yang tepatnya di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali.

Suatu program/perencanaan akan berjalan dengan baik apabila diketahui apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, dimana akan dilakukan, siapa pelaksana kegiatannya, mengapa dilakukan, dan berapa alokasi dana yang dibutuhkan. Selain itu, pihak terkait yang akan mensosialisasikan program juga harus memahami konsep program yang akan disosialisasikan terlebih dahulu agar apa yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh petani. Pihak yang dipilih bertugas mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang berbagai hal yang menyangkut Program GPKA selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada petani. Penyampaian informasi dilakukan dengan cara sosialisasi yaitu melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Informasi tentang GPKA tersebut dapat diperoleh dari DISPERTANBUNHUT dan Kantor Ketahanan Pangan.

Melalui sosialisasi diharapkan para petani dapat memahami tentang Program GPKA dan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas usahataniannya sehingga akan meningkatkan pendapatan. Apabila pendapatan meningkat maka petani dapat memenuhi semua kebutuhan hidup sehingga kesejahteraanpun juga akan meningkat. Untuk mensosialisasikan Program GPKA tidaklah mudah, ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendalanya antara lain kurangnya personil yang dilibatkan dalam sosialisasi dan aktivitas petani karena itu perlu kerja sama antar berbagai pihak seperti DISPERTANBUNHUT, Kantor Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian dan petani sendiri. Dengan mengetahui kendalanya maka dapat dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut secepatnya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terkait tentang Program GPKA dapat ditarik suatu kerangka berpikir mengenai sosialisasi Program GPKA (Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan). Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) kepada petani di Kabupaten Boyolali

Ket:

□ : Fokus penelitian

□ : Aspek Pendukung

### III. METODE PENELITIAN

#### Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat/memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan atau proses mengungkapkan rahasia sesuatu yang belum diketahui, dengan mempergunakan cara bekerja/metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan (Nawawi dan Martini, 1996).

Merriam *dalam* the Creswell (1994) menyebutkan enam asumsi dalam penelitian kualitatif yaitu (1) Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil akhir/produk, (2) Penelitian kualitatif mementingkan pada arti bagaimana orang-orang memaknai hidup mereka, pengalaman, dan struktur dunia mereka, (3) Penelitian kualitatif merupakan instrument penting untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Media data melalui instrument manusia ini lebih baik daripada melalui inventaris, kuisioner atau mesin, (4) Penelitian kualitatif mempengaruhi lingkungan kerja. Peneliti secara langsung mendatangi orang, tempat, atau institusi untuk meneliti/merekam keadaan di tempat tersebut. (5) Penelitian kualitatif merupakan gambaran bahwa peneliti tertarik pada proses, arti, dan menambah pemahaman melalui kata dan gambar, (6) Proses penelitian kualitatif disimpulkan bahwa peneliti membuat abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari data tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara deskriptif. Menurut Hasan (2002) penelitian deskriptif ialah penelitian yang menguraikan sifat/karakteristik dari suatu fenomena tertentu, mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan (objek yang diteliti). Tujuan dari penelitian dengan pendekatan deskriptif menurut Mardalis (2004) yaitu untuk mendeskripsikan

apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi/ada. Untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti.

### **Penentuan Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu di Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Program Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai salah satu instrument Program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Boyolali tahun 2006–2010. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2003 dan sepanjang perjalanannya pemerintah setempat memberikan kemudahan bagi para petani dalam mengembangkan usahataniannya, antara lain bantuan benih/bibit, alat dan mesin pertanian, pasar, serta pupuk.

Program GPKA di Kabupaten Boyolali ini diberi nama GOASEBO yang merupakan kepanjangan dari empat kecamatan yang terlibat dalam program tersebut, yaitu Kecamatan Cepogo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Selo, dan Kecamatan Boyolali. Pada penelitian ini akan mengambil dua kecamatan yakni Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Ampel merupakan kota tani utama karena karena wilayahnya lebih luas (8.468,06 Ha) dibandingkan dengan empat kecamatan yang lain yang termasuk dalam GOASEBO dan telah memiliki BPP Model. Sedangkan Kecamatan Boyolali dipilih sebagai daerah penyangga (*hinterland*) karena wilayahnya belum berkembang seperti Kecamatan Ampel. Luas wilayahnya hanya 2.625,10 Ha dan lokasi BPP masih bergabung dengan kantor kecamatan. Sehingga kedua kecamatan tersebut dapat dibandingkan dan nantinya akan terlihat secara jelas perbedaannya antara kedua kecamatan tersebut setelah dilakukan sosialisasi (wawancara dengan Bapak Tri Hartoyo selaku ketua Program GPKA, tanggal 20 Oktober 2008).



## **Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan)**

Menurut Sotopo (2002) teknik pengambilan sampel dengan cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan/pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi. Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan sebagai *internal sampling*, maksudnya cuplikan diambil untuk mewakili informasinya bukan pada populasinya sehingga jumlah informan (nara sumber) dalam penelitian ini tidak ditentukan karena yang terpenting bukan jumlahnya tetapi kelengkapan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Jumlah informan yang sedikit bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar daripada informasi yang diperoleh dari informan yang lebih banyak yang mungkin kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya. Menurut Bungin (2005) jumlah sampel (informan) bisa sedikit tetapi juga bisa banyak tergantung dari: a) tepat tidaknya pemilihan informan kunci, b) kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Pemilihan sampel/informan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling* karena mendasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu keingintahuan pribadi dan karakteristik empiris yang dihadapi dengan kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya yang menjadi fokus dalam penelitian. Selanjutnya bila dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka proses pengumpulan informasi dapat dihentikan. Sampai dengan berakhirnya pengumpulan informasi umumnya terdapat tiga tahap pemilihan sampel yakni: a) pemilihan sampel awal, apakah itu informan (untuk diwawancarai) atau situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus penelitian, b) pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi, c) menghentikan pemilihan sampel lanjutan bila dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi (Bungin, 2005).

*Purposive sampling* dilakukan untuk pemilihan sampel awal dan pemilihan sampel lanjutan dilakukan dengan *snowball sampling*.

Informan yang dipilih secara *purposive sampling* ini adalah :

1. Bapak Ir. Tri Hartoyo selaku staf di Kantor Ketahanan Pangan. Alasan peneliti memilih Bapak Ir. Tri Hartoyo sebagai informan karena merupakan tim pelaksana Program GPKA sehingga mengetahui banyak informasi yang terkait dengan Program GPKA tersebut.
2. Bapak Gunawan selaku staf di BAPPEDA. Alasan peneliti memilih Bapak Gunawan sebagai informan karena sebelumnya Bapak Gunawan bertugas di Kantor Ketahanan Pangan dan termasuk dalam tim pelaksana Program GPKA sehingga mengetahui informasi tentang Program GPKA.
3. Bapak Eko A.S. selaku Kabid Tanaman Pangan Hortiultura dan Usahatani di DISPERTANBUNHUT Kabupaten Boyolali. Alasan peneliti memilih Bapak Eko AS sebagai informan karena juga merupakan tim pelaksana Program GPKA sehingga mengetahui banyak informasi yang terkait dengan Program GPKA tersebut.

Pada teknik *snowball sampling* ini peneliti memilih suatu kelompok atau satu orang kemudian orang atau kelompok tersebut digunakan untuk menempatkan orang/kelompok lain yang memiliki karakteristik serupa dan sebaliknya, mengidentifikasi yang lain. Ibarat bola salju yang menggelinding sehingga semakin lama jumlah sample semakin banyak (Sumarni dan Salamah Wahyuni, 2005). Dalam hal ini peneliti menjadikan Bp. Ir. Tri Hartoyo sebagai sumber informasi pertama sekaligus informan kunci. Menurut Goetz dan LeCompte *dalam* Crabtree dan William L. Miller (1992) informan kunci adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan, status, atau kemampuan berkomunikasi tertentu, mereka yang rela untuk berbagi pengetahuan dan kemampuannya dengan peneliti dan seseorang yang mempunyai pandangan atau pengamatan terhadap penelitian. Karena informasi yang diperoleh dirasa kurang lengkap maka peneliti bertanya kepada informan pertama tersebut untuk menunjuk pihak kedua yang mengetahui informasi lebih lengkap yaitu Ibu Sukarni selaku PPL di BPP Boyolali

kemudian menunjuk Bp. Ir. Soemin selaku koordinator penyuluh di BPP Ampel sebagai pihak ke tiga. Dari pihak ke tiga ini kemudian menunjuk Bp. Darsono selaku PPL sekaligus bendahara GAPOKTAN di Desa Candi Kecamatan Ampel kemudian menunjuk Bp. Mulyoto selaku Ketua GAPOKTAN Desa Gladagsari Kecamatan Ampel. Pihak berikutnya yang dijadikan informan adalah Bp. Khosin (Ketua GAPOKTAN Desa Ngenden Kec. Ampel) kemudian Bp. Mujiono (Ketua GAPOKTAN Desa Ngenden Kec. Ampel), Bp. Sumeri (Ketua GAPOKTAN Desa Banyuanyar Kec. Ampel), Bp. Prpto Samiyo (Ketua GAPOKTAN Desa Ngagrang Kec. Ampel), Bp. Muhtamarin (Anggota Kelompok Tani “Tani Makmur” Desa Penggung Kec. Boyolali), dan informan yang terakhir adalah Bp. Muh. Syaebani (Kaur Pembangunan Desa Mudal Kec. Boyolali).

Jumlah informan seluruhnya adalah 13 orang. Karena informasi yang diperoleh sudah tidak bervariasi lagi atau sama maka peneliti memutuskan untuk menghentikan teknik *snowball sampling* ini. Jadi dengan kata lain penentuan informannya didasarkan pada suatu proses pencapaian kualitas informasinya (Susanto, 2006).

### **Jenis Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland *dalam* Moleong (2004), sumber data utama dari penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya data tambahan. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan, tempat dan peristiwa/aktivitas, serta sumber tertulis.

#### **1. Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian. Informan berkewajiban menjadi tim walaupun hanya bersifat informal. Syarat yang digunakan untuk memilih informan antara lain: jujur, taat pada janji, patuh terhadap peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota tim yang menentang penelitian (Moleong, 2004).

Berdasarkan keterangan dari Ibu Sukarni selaku PPL di BPP Boyolali informan selanjutnya yang dapat diwawancarai pada penelitian ini antara lain:

- a. Bp. Ir. Soemin adalah koordinator penyuluh di BPP Ampel
  - b. Bp. Darsono adalah bendahara GAPOKTAN Desa Candi Kec. Ampel
  - c. Bp. Mulyoto adalah ketua GAPOKTAN Desa Gladagsari Kec. Ampel
  - d. Bp. Khosin adalah ketua GAPOKTAN Desa Ngenden Kec. Ampel
  - e. Bp. Mujiono adalah ketua GAPOKTAN Desa Ngenden Kec. Ampel
  - f. Bp. Sumeri adalah ketua GAPOKTAN Desa Banyuanyar Kec. Ampel
  - g. Bp. Prapto Samiyo adalah ketua GAPOKTAN Desa Ngagrong Kec. Ampel
  - h. Bp. Muhtamarin adalah anggota Kelompok Tani “Tani Makmur” Desa Penggung Kec. Boyolali
  - i. Bp. Muh. Syaebani adalah Kaur Pembangunan Desa Mudal Kec. Boyolali
2. Tempat dan peristiwa/aktivitas

Sumber data yang dikumpulkan dari peristiwa/aktivitas dapat diketahui lebih pasti mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi karena menyaksikan sendiri secara langsung, baik peristiwa yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, aktivitas rutin yang berulang maupun yang hanya satu kali terjadi (Sutopo, 2002).

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran/permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan. Dari pengamatan pada tempat atau lokasi dengan keragaman benda yang berada dilokasi maka dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan perilaku atau peristiwa yang terjadi bahkan sangat berkaitan dengan sikap dan pandangan para pelakunya (Sutopo, 2002).

Tempat dan peristiwa/aktivitas yang diteliti meliputi lingkungan kerja (Kantor Ketahanan Pangan, Dispertanbunhut, BPP Ampel dan BPP Boyolali Kabupaten Boyolali), kondisi Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kecamatan Ampel dan lingkungan tempat tinggal/lahan petani yang mengikuti Program GPKA. Sebagai kelengkapan data, peneliti juga

menggunakan kamera untuk menampilkan keadaan di lapang, baik pada saat wawancara maupun saat kegiatan.

### 3. Sumber tertulis

Menurut Moleong (2001) dilihat dari segi sumber datanya, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat berupa arsip dan dokumen. Sutopo (2002) menambahkan bahwa dokumen dan arsip merupakan sumber tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa/aktivitas tertentu.

Keuntungan menggunakan dokumen/arsip ialah biaya relatif murah, waktu, tenaga lebih efisien. Data yang dikumpulkan cenderung merupakan data sekunder yang dapat diperoleh dari BPS, departemen/direktorat jendral terkait, kabupaten dalam angka, monografi kecamatan, laporan tahunan suatu badan/dinas pemerintah, internet, dan lain-lain (Susanto, 2006).

Dokumen/arsip yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data monografi kecamatan, rincian pelaksanaan kegiatan GPKA, laporan tahunan seksi agribisnis yang terkait dengan Program GPKA, dan data kelompok tani yang mengikuti Program GPKA serta RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tentang Program GPKA.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Creswell (1994) langkah-langkah dalam pengumpulan data melibatkan: (a) mengatur batas-batas dalam penelitian, (b) mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumen, dan (c) menetapkan informan untuk merekam informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen dan arsip (*content analysis*).

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak/hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Wirartha, 2005).

Secara umum kunci keberhasilan wawancara terletak pada suasana yang netral, rileks, akrab, dan bersahabat yang ditampilkan oleh responden. Penanya perlu menggunakan istilah yang mudah dipahami responden (Sudjana, 2006). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2003).

Pihak pertama yang diwawancarai adalah Bp. Ir. Tri Hartoyo selaku pelaksana Program GPKA yang bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali. Dalam wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai alat bantu. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan diajukan oleh pewawancara. Hasil wawancara tersebut kemudian didokumentasikan dengan foto dan pencatatan yang ditulis dengan alat bantu bolpoin dan buku tulis.

## 2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut Banisfer *dalam* Poerwandari (2001), observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung dilakukan dengan mengamati lingkungan kerja dari dinas terkait sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada dengan menggali informasi dari informan.

## 3. Mengkaji dokumen dan arsip (*Content Analysis/Analisis Isi*)

Mengkaji dokumen menurut Yin (1987) *dalam* Sutopo (2002) disebut sebagai *content analysis*. Peneliti tidak sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen dan arsip, tetapi juga memahami maknanya. Sehingga dalam mengkaji dokumen dan arsip harus bersikap kritis dan teliti.

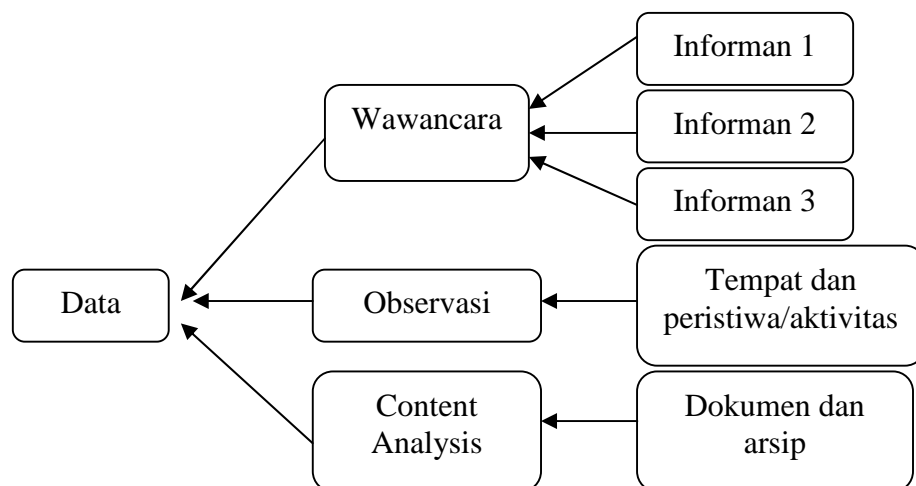
Menurut Holsti *dalam* Muhadjir (2002) mengemukakan 5 ciri *content analysis*. Pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangan. Kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori, dan mana yang tidak termasuk kategori. Ketiga, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya. Keempat, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi. Kelima, *content analysis* dapat menggunakan teknik-teknik kuantitatif.

### **Validitas Data**

Validitas adalah kesesuaian alat dengan apa yang hendak diukur, artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk mengukur hal atau subjek yang ingin diukur (Hasan, 2004). Sedangkan menurut Moleong (2001) validitas adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenologi yang bersifat multiperspektif yaitu menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya menggunakan satu cara pandang saja tetapi lebih (Hasan, 2004) atau kombinasi dari berbagai metode penelitian dalam fenomena yang sama (Jick *dalam* Maanen, 1985). Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2008).

Menurut Patton *dalam* Sutopo (2006) ada 4 macam triangulasi, yaitu (a) Triangulasi data/sumber (*data triangulation*), (b) Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (c) Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan (d) Triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data (sumber) dan *review* informan kunci. Triangulasi data (sumber) menurut Patton *dalam* Moleong (2001) berarti dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia atau membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sedangkan *review* informan kunci dilakukan dengan cara mengkomunikasikan kembali informasi yang telah diperoleh dengan informan kunci. Adapun penggunaan triangulasi data (sumber) menurut Sutopo (2006) pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Triangulasi Data (sumber)



## Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan peneliti membuat *coding*, memusatkan tema, menentukan batas permasalahan. Pada dasarnya reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan (Sotopo, 2002).

### 2. Sajian Data

Sajian data menurut Sutopo (2002) merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat sebagai pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

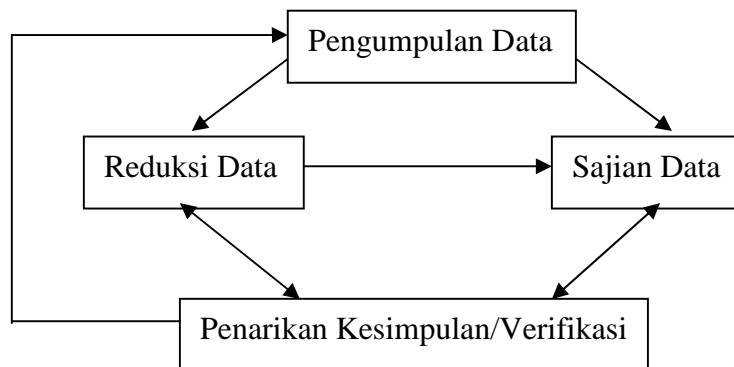
### 3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Kegiatan ke tiga adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang

peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif” (Miles dan Huberman, 1992).

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi atau sajian data. Bilamana kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti akan mengulangi kembali pengumpulan data yang terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalam data (Sutopo, 2002).

Dalam keadaan ini tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus sebagaimana gambar berikut



Gambar 3. Model Analisis Interaktif

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa proses analisis dengan tiga komponen yang ada saling menjalin dan dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Selain itu, tiga komponen tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaktif baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapang melalui wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam Program GPKA (Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan) maupun melalui kunjungan langsung ke petani yang melakukan Program GPKA di Kabupaten Boyolali. Untuk mendapatkan data tertulis, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah-milah data

yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam melakukan proses reduksi, peneliti sekaligus membuat sajian datanya yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami alur berpikirnya. Selama proses reduksi dan penyajian data ini peneliti sudah mulai dapat menarik kesimpulan yang akan diperoleh melalui data atau informasi yang didapatkan. Dalam menarik kesimpulan ini apabila kesimpulan yang diperoleh kurang meyakinkan maka peneliti menggali lagi informasi yang ada (kembali ke tahap pertama) sehingga semakin meyakinkan kesimpulan yang diperoleh. Oleh karena itu, model analisis interaktif ini merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antar satu dengan yang lainnya.

## IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

### A. Keadaan Alam

#### 1. Letak Geografis dan Topografi

##### a. Kecamatan Ampel

Kecamatan Ampel merupakan salah satu kecamatan dari wilayah Kabupaten Boyolali, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Semarang

Sebelah Timur : Kabupaten Semarang

Sebelah Selatan : Kecamatan Cepogo

Sebelah Barat : Kecamatan Selo, Kabupaten Magelang

Jarak pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Ampel dengan :

Desa terjauh : 17 Km

Ibukota Kabupaten : 11 Km

Ibukota Propinsi : 42 Km

Kecamatan Ampel terletak pada ketinggian 520–1.840 mdpl. Keadaan geografi Kecamatan Ampel terdiri dari 55 % bergelombang, 15 % bergelombang bergunung, dan 30 % bergunung. Jenis tanah Kecamatan Ampel adalah andosol coklat, andosol kelabu, latosol coklat dan regusol kelabu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007).

##### b. Kecamatan Boyolali

Kecamatan Boyolali merupakan salah satu kecamatan dari wilayah Kabupaten Boyolali yang terletak tidak jauh dari kota dan memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Semarang

Sebelah Timur : Kecamatan Mojosongo

Sebelah Selatan : Kecamatan Mojosongo

Sebelah Barat : Kecamatan Musuk, Cepogo dan Ampel

Jarak pusat pemerintah 34 km dari Kecamatan Boyolali dengan :

Desa terjauh : 6 Km  
Ibukota Kabupaten : 5 Km  
Ibukota Propinsi : 54 Km

Kecamatan Boyolali berada pada ketinggian 400–700 mdpl dan tanahnya miring dari barat ke timur kurang lebih 50<sup>0</sup>. Sedangkan jenis tanah di Kecamatan Boyolali adalah regusol kelabu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007).

## 2. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di suatu tempat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain curah hujan, kelembaban, angin, ketinggian tempat, dan suhu. Kecamatan Ampel dan Boyolali memiliki iklim sedang. Klasifikasi menurut Schmidt Ferguson, menggolongkan iklim berdasarkan pada banyaknya curah hujan tiap–tiap bulan dengan membandingkan jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah dalam 1 tahun yang dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- a.) Bulan Kering (BK) yaitu curah hujan yang sampai ke permukaan bumi kurang dari 60 mm.
- b.) Bulan Basah (BB) yaitu curah hujan yang sampai ke permukaan bumi lebih dari 60 mm.

Wladimir Koppen membuat klasifikasi iklim berdasarkan suhu dan kelembaban udara. Ada 5 kelompok yaitu:

- a.) Iklim A/Tropis, cirinya: suhu rata–rata bulanan tidak kurang dari 18 <sup>0</sup>C, suhu rata–rata tahunan 20 – 25 <sup>0</sup>C, curah hujan rata–rata > 70 mm per tahun, dan tumbuhan yang tumbuh beraneka ragam.
- b.) Iklim B/Gurun tropis/kering, cirinya: terdapat di daerah gurun/semi aride/stepa, curah hujan terendah < 25,4 mm per tahun.
- c.) Iklim C/Sedang, cirinya: suhu rata–rata bulan terdingin antara 18 <sup>0</sup>C sampai -3 <sup>0</sup>C.

- d.) Iklim D/Salju, cirinya: suhu rata-rata bulan terpanas  $> 10^{\circ}\text{C}$  dan suhu rata-rata bulan terdingin  $< -3^{\circ}\text{C}$ .
- e.) Iklim E/Kutub, cirinya: terdapat di daerah artik dan antartika, suhu tidak pernah  $10^{\circ}\text{C}$  sedangkan suhu rata-rata bulan terdingin  $> -3^{\circ}\text{C}$ .

([http:// www. E - dukasi. net](http://www.E-dukasi.net)).

a. Kecamatan Ampel

Kecamatan Ampel beriklim sedang. Rata-rata per bulan curah hujan di Kecamatan Ampel pada tahun 2007 adalah 2.253 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan adalah 147 Hari hujan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007).

b. Kecamatan Boyolali

Kecamatan Boyolali beriklim sedang dengan sungai-sungai kecil yang hanya mengalir pada musim penghujan. Rata-rata per bulan curah hujan di Kecamatan Boyolali pada tahun 2007 adalah 2.302 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan 91 Hari hujan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007).

3. Tataguna Lahan

Kecamatan Ampel mempunyai luas wilayah 8.468,06 Ha sedangkan Kecamatan Boyolali mempunyai luas wilayah 2.625,10 Ha dengan alokasi penggunaan lahan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Tataguna Lahan di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006

No	Tataguna Lahan	Luas Lahan (Ha)	Prosentase (%)
<b>A. Kecamatan Ampel</b>			
1.	Tanah Sawah	571,06	6,32
2.	Tanah Pekarangan	2.176,54	24,08
3.	Tanah Tegalan	4.857,18	53,73
4.	Hutan Negara	1.171,43	12,96
5.	Lainnya	262,91	2,91
Jumlah		9.039,13	100,00
<b>B. Kecamatan Boyolali</b>			
1.	Tanah Sawah	294,60	11,27
2.	Tanah Tegal/ ladang	908,40	34,76
3.	Tanah Pekarangan	1.218,60	46,63
4.	Lain-lain	191,50	7,34

Jumlah	2.613,10	100,00
--------	----------	--------

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Ampel sebagian besar tataguna lahannya berupa tanah tegalan yaitu sebesar 4.857,18 Ha atau 53,73%. Tanah tegalan di Kecamatan Ampel dimanfaatkan untuk ditanami tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang menonjol di Kecamatan Ampel antara lain kubis, wortel, dan cabe sedangkan buah-buahan yang menonjol antara lain mangga, durian, dan alpukat.

Lain halnya dengan Kecamatan Boyolali. Berdasarkan Tabel 1 tataguna lahannya berupa tanah pekarangan yaitu sebesar 1.218,60 Ha atau 46%. Tanah pekarangan tersebut biasanya lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk beternak sapi, kambing dan itik. Sedangkan tanah sawah yang terdapat di kedua kecamatan dimanfaatkan untuk ditanami tanaman padi.

## **B. Keadaan Penduduk**

### **1. Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Keadaan penduduk menurut umur di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kategori usia produktif (15-64 th), non produktif (>65 th), dan usia belum produktif (0-14 th). Pengkategorian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih mampu bekerja dan tidak mampu bekerja. Untuk lebih jelas mengenai keadaan penduduk di Kecamatan Ampel dan Boyolali dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Keadaan Penduduk Menurut Umur di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006

Kelompok Umur (tahun)	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1. Kecamatan Ampel		
a. 0 – 4	5.054	7,40
b. 5 – 9	5.680	8,30
c. 10 – 14	6.328	9,20
d. 15 – 24	10.746	15,70
e. 25 – 34	11.217	16,30
f. 35 – 44	9.711	14,10
g. 45 – 54	8.285	12,10
h. 55 – 64	6.094	8,90
i. >65	5.383	7,90
Jumlah	68.498	100,00
2. Kecamatan Boyolali		
a. 0 – 4	4.341	7,40
b. 5 – 9	4.883	8,30
c. 10 – 14	5.442	9,20
d. 15 – 24	9.235	15,70
e. 25 – 34	9.640	16,30
f. 35 – 44	8.344	14,10
g. 45 – 54	7.120	12,10
h. 55 – 64	5.235	8,90
i. > 65	4.625	7,90
Jumlah	58.865	100,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Tabel 2 menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Ampel yang termasuk dalam kategori usia produktif (15-64 th) yaitu sebanyak 46.053 jiwa atau 67% dan usia non produktif (>65 th) sebanyak 5.383 jiwa atau 7,9% sedangkan pada usia 0-14 tahun sebanyak 17.062 jiwa atau 24,9% termasuk dalam kategori usia belum produktif secara ekonomi. Untuk penduduk di Kecamatan Boyolali yang termasuk dalam kategori usia produktif (15-64) adalah 39.574 jiwa atau 55%, usia non produktif (>65 th) sebanyak 4.625 jiwa atau 6,4%, dan usia belum produktif (0-14 th) sebesar 14.666 jiwa atau 20,4%.

Jumlah masing-masing kelompok umur tersebut dapat digunakan untuk menentukan besarnya Rasio Beban Tanggungan (*Dependency*



*Rasio=DR*). DR atau yang biasa disebut dengan Angka Beban Tanggungan (ABT) ialah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk pada usia non produktif dan belum produktif (0-14 th dan > 65 th) yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 th).

DR di Kecamatan Ampel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut

$$DR = \frac{\text{Pendudukumur}(0-14) + \text{pendudukumur} > 65\text{tahun}}{\text{Pendudukberumur}(15-64)\text{tahun}} \times 100$$

$$\begin{aligned} DR &= \frac{17062 + 5383}{46053} \times 100 \\ &= \frac{22445}{46053} \times 100 \\ &= 48,73 \quad \longrightarrow \quad 49 \end{aligned}$$

DR di Kecamatan Boyolali dapat dihitung dengan cara sebagai berikut

$$DR = \frac{\text{Pendudukumur}(0-14) + \text{pendudukumur} > 65\text{tahun}}{\text{Pendudukberumur}(15-64)\text{tahun}} \times 100$$

$$\begin{aligned} DR &= \frac{14666 + 4625}{39574} \times 100 \\ &= \frac{19291}{39574} \times 100 \\ &= 48,75 \quad \longrightarrow \quad 49 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai DR di Kecamatan Ampel dan Boyolali sama-sama sebesar 49 yang artinya tiap 100 jiwa kelompok penduduk usia produktif harus menanggung 49 kelompok penduduk usia non produktif. Angka DR tersebut termasuk rendah sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non produktif menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja lebih banyak sehingga sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari kelompok usia produktif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia belum produktif. Bekerja dapat diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan/membantu menghasilkan barang atau jasa dengan

maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang dalam kurun waktu (*time reference*) tertentu (Mantra, 2003).

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Boyolali dapat ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1. Kecamatan Ampel		
a. Laki-laki	33.417	48,79
b. Perempuan	35.081	51,21
Jumlah	68.498	100,00
2. Kecamatan Boyolali		
a. Laki-laki	28.862	49,03
b. Perempuan	30.003	50,97
Jumlah	58.865	100,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin digunakan untuk mengetahui besarnya sex ratio. Sex ratio (SR) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (Mantra, 2003) atau banyaknya laki-laki setiap 100 perempuan. Jika nilai SR diatas 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan atau sebaliknya.

Sex ratio di Kecamatan Ampel dapat dicari dengan cara sebagai berikut:

$$SR = \frac{\sum \text{penduduk laki-laki}}{\sum \text{penduduk perempuan}} \times 100 \%$$

$$SR = \frac{33.417}{35.081} \times 100 \%$$

$$= 95,3 \approx 95 \%$$

Sedangkan Sex ratio di Kecamatan Boyolali dapat dihitung sebagai berikut

$$SR = \frac{\sum \text{penduduk laki-laki}}{\sum \text{penduduk perempuan}} \times 100 \%$$

$$SR = \frac{28.862}{30.003} \times 100 \%$$

$$= 96,1 \approx 96 \%$$

Sex ratio di Kecamatan Ampel adalah sebesar 95% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki dan Sex ratio di Kecamatan Boyolali adalah sebesar 96% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Nilai SR pada Kecamatan Ampel dan Boyolali hampir sama dan tidak terlalu jauh di bawah 100 sehingga di wilayah tersebut tidak kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan, misalnya pembangunan jalan, saluran irigasi, dan lainnya yang memerlukan tenaga kerja laki-laki.

## 2. Keadaan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Keadaan penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kecamatan Ampel dan Boyolali dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Keadaan Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006

No	Lapangan Pekerjaan	Kec. Ampel		Kec. Boyolali	
		Jml Penduduk (Jiwa)	Prosen-tase (%)	Jml Penduduk (Jiwa)	Prosen-tase (%)
1.	Pert. Tan. Pangan	15.035	26,03	3.656	7,40
2.	Perkebunan	166	0,29	15	0,03
3.	Perikanan	-	-	20	0,04
4.	Peternakan	2.340	4,05	212	0,43
5.	Pertanian lainnya	542	0,94	91	0,18
6.	Industri Pengolahan	481	0,83	2.988	6,05
7.	Perdagangan	973	1,68	3.540	7,17
8.	Jasa	4.067	7,04	6.559	13,28
9.	Angkutan	74	0,13	558	1,13
10.	Lainnya	34.086	59,01	31.740	64,29
	Jumlah	57.764	100,00	49.379	100,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Ampel menempati lapangan pekerjaan pada pertanian tanaman pangan yaitu 15.035 jiwa atau 26,03% sedangkan lapangan pekerjaan yang paling sedikit adalah angkutan yang hanya berjumlah

74 jiwa atau 0,13%. Adapun jenis angkutan yang ada antara lain sepeda motor, colt, bus, dan truk.

Jenis tanaman yang termasuk dalam pertanian tanaman pangan adalah padi sawah (809 Ha), padi ladang (145 Ha), jagung (4.661 Ha), ubi kayu (550 Ha), ubi jalar (2 Ha), dan kacang tanah (234 Ha). Untuk jenis padi sawah dan kacang tanah banyak ditanam di Desa Ngampon. Padi ladang dan ubi kayu banyak ditanam di Desa Ngargosari. Sedangkan jagung banyak ditanam di Desa Kembang dan ubi jalar ditanam di Desa Candi (DISTANBUNHUT Kabupaten Boyolali, 2007).

Pada Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa lapangan pekerjaan penduduk di Kecamatan Boyolali mayoritas adalah jasa yaitu sebesar 6.559 jiwa atau 13,28%. Jenis lapangan pekerjaan yang termasuk dalam jasa antara lain bengkel, foto copy, warpostel (warung pos dan telepon). Sedangkan yang paling sedikit adalah perkebunan yaitu 15 jiwa atau 0,03% saja karena penduduknya lebih tertarik di bidang jasa daripada di bidang perkebunan karena menganggap bahwa di bidang perkebunan memerlukan modal yang cukup banyak, begitu juga resiko yang ditanggung apabila gagal panen maka nilai jualnya akan turun.

Jenis lapangan pekerjaan seperti ABRI/TNI, PNS/guru, buruh, dan swasta masuk dalam kelompok lapangan pekerjaan lainnya, kelompok tersebut juga memiliki jumlah yang banyak. Di Kecamatan Ampel sebesar 34.086 jiwa atau 59,01% sedangkan di Kecamatan Boyolali sebesar 31.740 jiwa atau 64,29%. Karena jenis lapangan pekerjaan lainnya tidak diuraikan secara terperinci maka lapangan pekerjaan yang menonjol di Kecamatan Ampel adalah di bidang pertanian tanaman pangan sedangkan di Kecamatan Boyolali yang menonjol adalah jasa.

Menurut data Tabel 4 dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ampel lebih bersifat agraris dan penduduknya terdorong untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian. Usaha tersebut dilakukan dengan mengembangkan lahan tegalan yang ada meskipun tingkat pendidikan

penduduknya sebagian besar tidak/belum tamat SD tetapi tidak menjadi penghalang untuk mengembangkan usaha pertanian.

Berdasarkan Tabel 4 mengenai keadaan penduduk menurut lapangan pekerjaan, di Kecamatan Ampel tidak terdapat jenis lapangan pekerjaan perikanan. Hal ini berarti usaha perikanan di Kecamatan Boyolali lebih berkembang dibandingkan dengan Kecamatan Ampel.

### 3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas SDM karena menjadi modal utama dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka akan menghasilkan SDM yang tinggi pula dan akan menjadi modal dalam memajukan pembangunan. Untuk mengetahui keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Ampel dan Boyolali dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006

No	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Kec. Ampel		Kec. Boyolali	
		Jml Penduduk (Jiwa)	Prosen tase (%)	Jml Penduduk (Jiwa)	Prosen tase (%)
1.	PT/ D IV	205	0,32	1.932	3,57
2.	Akademi	56	0,09	1.436	2,65
3.	D I/ D II	172	0,27	-	-
4.	SLTA/ sederajat	2.846	4,49	11.398	21,03
5.	SLTP/ sederajat	5.967	9,40	9.914	18,30
6.	SD/ sederajat	22.619	35,65	14.103	26,03
7.	Tidak/belum tamat SD	31.579	49,78	15.398	28,42
Jumlah		63.444	100,00	54.181	100,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Ampel tidak berpendidikan/belum tamat SD yaitu sebesar 31.579 jiwa (49,78%). Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah adalah tingkat pendidikan akademi yaitu sebesar 56 jiwa (0,09%). Hal ini berarti tingkat pendidikan di Kecamatan Ampel masih tergolong rendah. Oleh karena itu perlu peningkatan dalam hal pendidikan karena apabila penduduk berpendidikan tinggi maka akan lebih mudah dalam hal

penerimaan pengetahuan dan penerapan inovasi walaupun demikian penduduknya mampu untuk mengembangkan usaha bidang pertanian tanaman pangan, misalnya padi, dengan teknologi sekarang ini tidak menuntut pendidikan yang tinggi.

Tabel 5 juga menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan Boyolali sebagian besar tidak berpendidikan/belum tamat SD yaitu sebesar 15.398 jiwa atau 28,42%. Tingkat pendidikan akademi jumlahnya juga sedikit yaitu sebesar 1.436 jiwa (2,65%). Hal ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pengetahuan dan penerapan inovasi. Biasanya penduduk yang tingkat pendidikannya rendah maka sulit untuk menerima pengetahuan dan menerapkan inovasi baru karena masih bersifat tradisional atau percaya pada jaman dulu dan tidak mau menanggung resiko.

### **C. Keadaan Pertanian**

#### **1. Luas Panen dan Produksi Sayuran**

Tanaman sayuran merupakan salah satu bagian dalam “empat sehat lima sempurna” karena memiliki kandungan gizi yang banyak sehingga perlu dikembangkan. Jenis sayuran yang dikembangkan di suatu daerah dengan daerah lain belum tentu sama. Dalam mengembangkannya harus didukung oleh topografi, kondisi tanah, dan iklim yang baik agar produktivitasnya tinggi.

Untuk mengetahui jenis sayuran berserta rata-rata produksi yang ada di Kecamatan Ampel dan Boyolali dapat dilihat pada Tabel 6. Rata-rata produksi sayuran terbesar yang ada di Kecamatan Ampel adalah labu siam yaitu 440,83 Kw/Ha, kemudian disusul kubis (160,50 Kw/Ha), dan sawi (105,00 Kw/Ha), sedangkan rata-rata produksi jenis sayuran yang paling rendah adalah cabe yaitu 11,93 Kw/Ha.

Tabel 6 Luas Panen dan Produksi Sayuran di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Tahun 2006

No	Jenis Sayuran	Kec. Ampel			Kec. Boyolali		
		Luas Panen (Ha)	Pro-duksi (Kw)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)	Luas Panen (Ha)	Pro-duksi (Kw)	Rata-rata produksi (Kw/Ha)
1.	Bawang Merah	6	385	64,17	-	-	-
2.	Bawang Daun	55	4.195	76,28	-	-	-
3.	Kentang	6	600	100,00	-	-	-
4.	Wortel	63	7.050	11,20	-	-	-
5.	Kubis	111	17.815	160,50	-	-	-
6.	Sawi	2	210	105,00	-	-	-
7.	Cabe	370	4.415	11,93	22	1.084	49,28
8.	Terong	5	406	81,20	4	720	180,00
9.	Buncis	18	1.686	93,67	-	-	-
10.	Labu Siam	6	2.645	440,83	-	-	-
11.	Mentimun	-	-	-	27	6.398	236,97

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Boyolali rata-rata produksi jenis sayuran yang tertinggi adalah mentimun menempati posisi tertinggi yaitu 236,97 Kw/Ha, sedangkan terong termasuk jenis sayuran tertinggi yang ke dua yaitu sebanyak 180,00 Kw/Ha dan cabe adalah yang terendah yaitu 49,28 Kw/Ha.

Apabila dicermati pada Tabel 6 tersebut jenis sayuran yang dikembangkan di Kecamatan Ampel jauh lebih banyak daripada di Kecamatan Boyolali. Hal ini salah satunya disebabkan karena luas lahan di Kecamatan Ampel lebih besar.

## 2. Produksi Buah-buahan

Tanaman buah-buahan sangat penting keberadaannya bagi manusia. Selain sebagai sumber vitamin, makanan, dan minuman juga dapat dimanfaatkan untuk melestarikan lingkungan. Misalnya tanaman mangga

dan kelapa, memiliki pohon yang kuat sehingga mampu untuk menahan air apabila ada bencana banjir.

a. Kecamatan Ampel

Jumlah keseluruhan produksi buah-buahan di Kecamatan Ampel sebanyak 59.987 Kw. Jumlah tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Kecamatan Boyolali yang hanya sebanyak 5.096 Kw. Rincian produksi buah-buahan dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7 Produksi Buah-buahan di Kecamatan Ampel Tahun 2006

No	Jenis Buah	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kw/tahun)
1.	Alpukat	11.680	5.840,00
2.	Rambutan	5.400	5.400,00
3.	Duku	600	600,00
4.	Jeruk siam	330	330,00
5.	Nanas	86	86,00
6.	Durian	12.812	12.812,00
7.	Pisang	9.645	2.411,25
8.	Jambu biji	520	520,00
9.	Pepaya	3.639	909,75
10.	Mangga	14.700	7.350,00
11.	Salak pondoh	575	575,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa rata-rata produksi jenis buah-buahan terbanyak adalah mangga yaitu 14.700 Kw sedangkan produksi buah nanas menempati posisi yang terendah yakni sebanyak 86 Kw saja karena hampir semua tempat tinggal penduduk di Kecamatan Ampel menanam mangga. Jenis mangga yang ditanam antara lain mangga arum manis, mangga manalagi. Meskipun daerah Ampel terkenal dengan “buah pepayanya” tetapi produksi buah pepaya di Ampel kurang optimal karena penduduknya ingin mencoba tanaman buah lain seperti durian dan alpukat agar lebih bervariasi dan produksi buah selain pepaya dapat dikenal oleh masyarakat luas.

b. Kecamatan Boyolali



Produksi buah-buahan di Kecamatan Boyolali relatif sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Ampel meskipun buah-buahan yang ditanam jenisnya hampir sama. Jumlah keseluruhan produksi buah-buahan tersebut sebanyak 5.096 Kw. Jenis buah-buahan yang ada di Kecamatan Boyolali tetapi tidak ada di Kecamatan Ampel adalah manggis, jambu air, sawo, dan nangka. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8 Produksi Buah-buahan di Kecamatan Boyolali Tahun 2006

No	Jenis Buah	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kw/tahun)
1.	Alpukat	37	18,50
2.	Manggis	8	4,00
3.	Jeruk siam	4	1,30
4.	Nanas	23	7,67
5.	Durian	2.168	2.168,00
6.	Pisang	2.207	551,75
7.	Jambu biji	47	15,67
8.	Jambu air	55	27,50
9.	Sawo	246	61,50
10.	Pepaya	55	13,75
11.	Nangka	246	82,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Dari data di atas diketahui bahwa produksi buah-buahan yang paling banyak adalah buah pisang yaitu sebanyak 2.207 Kw dan terendah adalah jeruk siam yaitu sebesar 4 Kw. Hal ini dikarenakan di tiap desa penduduknya menanam tanaman pisang. Menurut DISTANBUNHUT Kabupaten Boyolali (2007) tanaman pisang ini banyak ditanam di Desa Winong dan Kebonbimo.

### 3. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan

#### a. Kecamatan Ampel

Tanaman perkebunan tidak kalah pentingnya dengan tanaman sayuran dan buah-buahan. Meskipun tidak memiliki kandungan gizi yang banyak tetapi ikut andil dalam usaha pelestarian lingkungan, yaitu untuk mencegah erosi. Selain itu juga dapat dijadikan bahan baku

minuman seperti teh, kopi dan jahe. Luas lahan dan produksi tanaman perkebunan di Kecamatan Ampel dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Ampel Tahun 2006

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kg)	Rata-rata Produksi(Kg/Ha)
1.	Kelapa	461,00	591.730	128,36
2.	Cengkeh	154,00	77.000	0,50
3.	Teh	14,50	12.080	83,31
4.	Tembakau	120,00	96.000	0,80
5.	Jahe	71,00	549.000	7,73
6.	Kopi robusta	126,60	68.250	53,90
7.	Kopi arabika	65,60	40.900	6,23
8.	Kapuk randu	14,00	6.740	48,14

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa produksi tanaman perkebunan kelapa adalah paling banyak yakni 2.958.650 butir (591.730 Kg) kemudian tanaman jahe sebanyak 549.000 Kg. Sedangkan yang paling sedikit adalah kapuk randu yang hanya 6.740 Kg. Hal ini dikarenakan Kecamatan Ampel menerima bantuan bibit kelapa selain itu kondisi tanah di daerah tersebut cocok untuk ditanami kelapa.

Tanaman kelapa ini lebih banyak ditanam di tepi jalan. Tujuan dari penanaman tersebut adalah untuk mengurangi erosi karena bentuk tanahnya bergelombang, bergelombang bergunung dan bergunung (wawancara dengan Bapak Muhtamarin dari anggota Kelompok Tani “Tani Makmur” Desa Penggung Kec. Boyolali, 2008) selain itu, daerah disana beriklim sedang dengan rata-rata hari hujan per bulan adalah 147 Hari hujan.

#### b. Kecamatan Boyolali

Jenis tanaman perkebunan di Kecamatan Boyolali juga memiliki manfaat yang hampir sama dengan Kecamatan Ampel yaitu sebagai bahan baku minuman. Tetapi jumlahnya relative lebih sedikit

dibandingkan di Kecamatan Ampel. Luas lahan dan produksi tanaman perkebunan di Kecamatan Boyolali dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Boyolali Tahun 2006

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kg)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha)
1.	Kelapa	108,65	106.720	98,22
2.	Cengkeh	4,81	2.020	42,00
3.	Tembakau	5,00	2.750	55,00
4.	Kopi robusta	2,09	840	402,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2007

Tabel 10 menunjukkan bahwa produksi tanaman perkebunan kelapa adalah paling banyak yakni 533.600 butir (106.720 Kg). Sedangkan yang paling sedikit adalah kopi robusta yaitu 840 Kg. Hal ini dikarenakan tanah di Kecamatan Boyolali berbentuk miring sehingga untuk mengurangi erosi diperlukan tanaman yang mampu menahan air, salah satunya kelapa.

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 ternyata produksi kelapa di kedua kecamatan tersebut sama-sama menunjukkan nilai yang paling tinggi karena tanaman kelapa memang cocok ditanam di daerah Kecamatan Ampel dan Boyolali. Tidak hanya di Kecamatan Ampel dan Boyolali saja, tetapi cocok untuk ditanam di berbagai daerah.

## V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tentang Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali

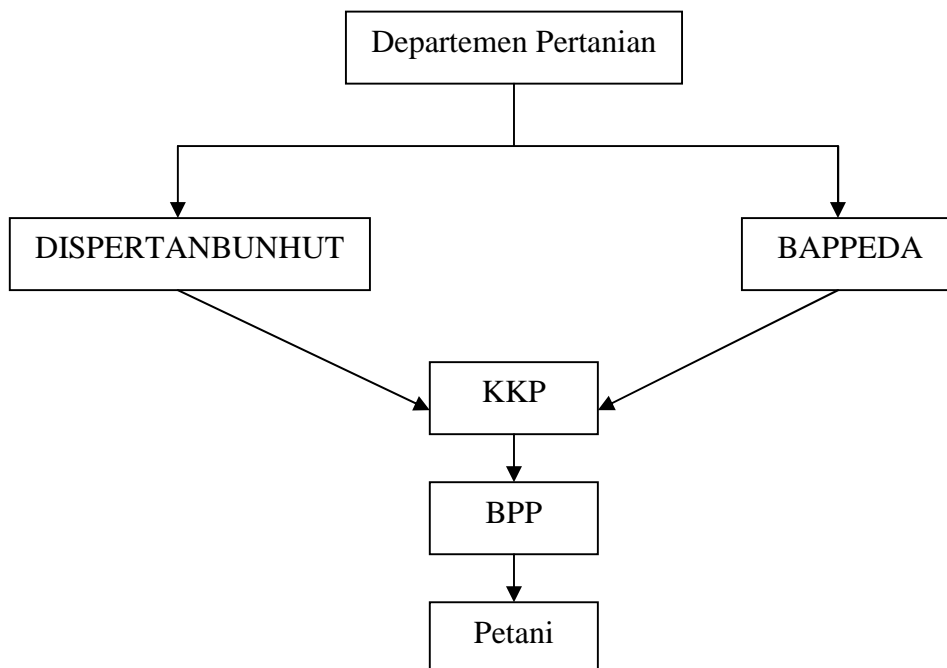
Rustiadi dan Sugimin Pranoto (2007) mengemukakan bahwa konsep pengembangan kawasan agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan wilayah antara kota dan pedesaan. Kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi sedangkan pedesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal.

Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah pedesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat pedesaan. Begitu juga di Kabupaten Boyolali. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan menurut Kantor Ketahanan Pangan Boyolali (2008) merupakan salah satu instrument dalam Program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali tahun 2006–2010 guna mengatasi permasalahan yang ada.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Boyolali telah berlangsung sejak tahun 2003. Pada awal pembentukannya berupa program “rintisan agropolitan” yang dilaksanakan di empat kecamatan (Cepogo, Ampel, Selo, dan Boyolali) atau biasa disebut dengan “GPKA GOASEBO”. Dalam hal ini Kecamatan Ampel dipilih sebagai kota tani utama karena wilayahnya lebih luas (8.468,06 Ha) dibandingkan dengan empat kecamatan yang lain yang termasuk dalam GOASEBO dan telah memiliki BPP Model. Kecamatan Ampel juga merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki jumlah kelompok tani terbanyak di Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kecamatan Boyolali dipilih sebagai daerah penyangga (*hinterland*) karena wilayahnya belum berkembang seperti Kecamatan Ampel. Luas wilayahnya

hanya 2.625,10 Ha dan lokasi BPP masih bergabung dengan kantor kecamatan (Kantor Ketahanan Pangan Boyolali, 2008). Kedua kecamatan ini dimungkinkan memiliki perbedaan dalam hal mensosialisasikan Program GPKA sehingga peneliti memilih dua kecamatan tersebut sebagai bahan penelitian di lapang.

Program GPKA ini merupakan program dari pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian yang memberi mandat kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DISPERTANBUNHUT) di masing-masing kabupaten yang ada di Indonesia, termasuk Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan Program GPKA. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan bersama-sama BAPPEDA kemudian melakukan perencanaan terhadap Program GPKA tersebut. Setelah perencanaan matang baru kemudian di limpahkan kepada Kantor Ketahanan Pangan (KKP). Untuk mempermudah sosialisasi program tersebut, KKP bekerja sama dengan BPP kemudian menyampaikannya kepada petani di masing-masing wilayah yang bersangkutan. Uraian tersebut dapat digambarkan dengan struktur sebagai berikut



Gambar 3. Skema Program GPKA

Program ini dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan bibit/benih buah-buahan, sayuran, alsintan (alat dan mesin pertanian), pembangunan jalan antar desa untuk usahatani dan pasar/STA (Sub Terminal Agribisnis) sekaligus untuk pariwisata karena di Kabupaten Boyolali berpeluang untuk dikembangkan pariwisata. Jenis buah-buahan yang diberikan antara lain salak, kelapa, pisang, durian, rambutan dan alpukat sedangkan jenis sayuran yang diberikan antara lain jagung, kacang, cabe. Untuk bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) berupa *hand traktor*, pompa air, *sprayer*. Pemberian bantuan alsintan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu dan produktivitas usahatani (Kantor Ketahanan Pangan Boyolali, 2008).

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri Hartoyo selaku tim pelaksana Program GPKA bahwa

*“Bentuk kegiatan Program GPKA itu bermacam-macam yaitu berupa bantuan benih buah-buahan, alsintan, pembangunan pasar/STA (Sub Terminal Agrobisnis), pembangunan jalan antar desa. Dan bisa juga dikembangkan pariwisata karena daerah Boyolali cocok/potensial untuk kegiatan pariwisata.”*  
(Wawancara tanggal 30 Desember 2008).

Berdasarkan hasil laporan akhir tahun 2008, Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Program GPKA meliputi:

1. Pengembangan kelembagaan kelompok tani

- a. Pembinaan Kelompok Tani

Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing daerah yang termasuk dalam wilayah GOASEBO (Cepogo, Ampel, Selo, dan Boyolali). Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kantor Ketahanan Pangan Boyolali (2008) peserta undangan berasal dari pengurus Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), dan Kaur Pembangunan Desa. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelompok

tani dilaksanakan masing-masing satu kali yaitu di Kecamatan Boyolali, Kecamatan Ampel, Kecamatan Selo sedangkan di Kecamatan Cepogo sebanyak dua kali. Materi yang disampaikan membahas tentang dinamika kelompok tani dan pengembangan agribisnis.

Teknik penyuluhan yang digunakan yaitu ceramah. Ceramah ialah suatu pertemuan untuk menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu relatif cepat dan biasanya dilakukan oleh moderator (Mardikanto dan Arip W, 2005). Dalam hal ini yang bertindak sebagai moderator dari Kantor Ketahanan Pangan. Adapun keunggulan dari teknik ceramah antara lain efektivitas pertemuan tinggi dan informasi yang disampaikan dapat lebih mendalam asalkan materinya disampaikan dengan baik/disertai dengan alat peraga seperti leaflet, brosur yang berisi keterangan tentang materi yang disampaikan dan dibagikan kepada anggota yang hadir. Setelah ceramah dilanjutkan dengan diskusi.

Menurut Mardikanto dan Arip W (2005) dengan metode diskusi sasaran memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan informasi, baik yang berupa pendapatnya sendiri maupun tanggapannya atas informasi yang disampaikan oleh penyuluh atau sesama anggota/sasaran penyuluhan lainnya. Dalam diskusi peran penyuluh relatif lebih kecil, kehadiran penyuluh lebih banyak sebagai fasilitator/nara sumber dan bukan semata-mata sebagai sumber informasi atau informan saja. Sebagai pemateri/nara sumbernya adalah dari Kantor Ketahanan Pangan dan UPT DISPERTANBUNHUT. Adapun alat yang digunakan adalah LCD, *note book*, dan ATK (Alat Tulis Kantor).

#### b. Revitalisasi Kelompok Tani

Revitalisasi kelompok tani merupakan proses/upaya untuk mengaktifkan kembali kelompok tani. Kelompok tani yang sebelumnya masih pasif diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertanian. Menurut hasil

survai yang telah dilakukan oleh tim UNPAD (1980) menunjukkan bahwa motivasi utama keikutsertaan anggota dalam kelompok tani terutama didorong oleh hasrat untuk meningkatkan kemampuan berusaha tani dan pemenuhan kebutuhan primer (terutama yang berupa sarana produksi pertanian) (Mardikanto, 1993). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan kelompok tani ini mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan yang termasuk dalam kawasan agropolitan GOASEBO. Sebagai pemateri/nara sumbernya adalah dari Kantor Ketahanan Pangan dan UPT DISPERTANBUNHUT. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya ketertiban dan legalisasi kelompok tani serta aktualisasi kelompok tani.

c. Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ampel yang tepatnya di BPP Ampel dengan mengundang masing-masing perwakilan ketua kelompok tani yang tergolong dalam GOASEBO, kepala desa, serta camat. Kegiatan ini dilakukan setelah wilayah yang bersangkutan memperoleh penyuluhan dari dinas terkait.

d. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen

Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kecamatan Ampel yang tepatnya di BPP Ampel dengan mengundang masing-masing perwakilan ketua kelompok tani yang tergolong dalam GOASEBO, kepala desa, serta camat. Kegiatan ini dilakukan setelah wilayah yang bersangkutan memperoleh penyuluhan dari dinas terkait.

2. Pengembangan dan Peningkatan SDM Petani

Kegiatan ini berupa studi banding yaitu belajar dan melihat dari dekat tentang kondisi, pelaksanaan dan pengelolaan STA (Sub Terminal Agribisnis) di STA Sewukan Kabupaten Magelang. Peserta yang hadir berasal dari pelaku pasar, asosiasi/paguyuban/forum peduli agropolitan serta tim pembina dan Pokja agropolitan Kabupaten/Kecamatan Ampel



dan Cepogo. Bahan dan alat yang digunakan adalah ATK dan sarana angkutan penumpang. Nara sumber dalam kegiatan ini adalah petugas dari Bappeda Kabupaten Magelang selaku ketua tim pengembangan agropolitan Merapi Merbabu yaitu Bp. Fahrul A dan ketua tim pengelola STA Sewukan, Kabupaten Magelang yaitu Bp. Riswanto Sudiyono (Kantor Ketahanan Pangan Boyolali, 2008).

Para peserta cukup antusias dalam mendalami tentang kondisi, pelaksanaan dan pengelolaan STA termasuk menggali informasi dari para pelaku agrobisnis setempat. Para peserta diterima di ruang pertemuan STA dan diberikan penjelasan mengenai hal-hal ihwal berkaitan dengan kegiatan agropolitan di Kabupaten Magelang oleh pejabat Bappeda Kabupaten Magelang dan STA Sewukan oleh ketua tim pengelola STA Sewukan.

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah

- a. Dapat dipahaminya bagaimana cara pengelolaan STA mengenai riwayat, dasar hukum, organisasi pengelola, mekanisme operasional, kontribusi kepada Pemda, pengolahan sampah
  - b. Dibahasnya calon pengelola STA Ampel yang diharapkan mulai aktif pada tahun 2009
  - c. Berkembangnya aktifitas agribisnis terutama komoditas sayuran yang melibatkan pelaku dan komoditas dari Boyolali dalam transaksi dengan berbagai STA dari daerah lain
3. Pendistribusian Alsintan bagi Kelompok Tani

Alsintan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan skala usaha. Kegiatan pendistribusian alsintan ini diberikan kepada ketua Gapoktan, industri rumah tangga serta koordinator penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan yang termasuk dalam GOASEBO.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah

- a. Dimanfaatkannya alsintan oleh masyarakat melalui Gapoktan, industri rumah tangga, dan koordinator penyuluh di wilayah pengembangan

kawasan agropolitan untuk menunjang produksi dan pengolahan pasca panen hasil pertanian dalam rangka pengembangan agribisnis.

- b. Terjadinya pemupukan modal oleh Gapoktan/industri rumah tangga dari hasil kontribusi penggunaan alsintan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Hartoyo (24 April 2009) jenis alsintan yang diberikan kepada Gapoktan antara lain *handtraktor* sebanyak 2 buah, pompa air sebanyak 12 buah, *sprayer* sebanyak 60 buah, alat iris jahe sebanyak 1 buah, dan perajang criping/singkong sebanyak 3 buah. Setelah mendapat izin untuk meminjam alsintan mereka harus melaporkan keberadaan/kondisi alsintan tersebut tiap 6 bulan sekali. Untuk alsintan berupa *handtraktor* ada kontribusi pemasukan. Bagi anggota Gapoktan yang memakai harus membayar uang yang nilainya sesuai dengan kesepakatan. Uang tersebut digunakan untuk membeli BBM/oli, membayar tenaga kerja, dan pengisian kas kelompok tani/Gapoktan. Uang yang terkumpul tadi nantinya dapat dimanfaatkan oleh anggota sebagai modal bersama untuk usaha. Misalnya membeli gelas/piring yang suatu saat dapat digunakan dalam acara pengajian/sarasehan.

#### 4. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu: Ruang Merpati (Setda Kabupaten Boyolali), ruang rapat asisten Pembangunan, Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, dan Ruang Garuda Setda Kabupaten Boyolali.

Keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan Program GPKA tersebut dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali. Peran pemerintah pada tahap perkembangan awal kawasan agropolitan adalah memfasilitasi terbentuknya suatu kawasan pengembangan agropolitan dan pada perkembangan berikutnya, pemerintah mulai mengurangi perannya, tidak seluruhnya ditangani oleh pemerintah tetapi sebagian diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan dalam perkembangan akhir, pengembangan kawasan agropolitan diserahkan kepada masyarakat seluruhnya agar menjadi kawasan

yang mandiri, pemerintah berperan hanya dalam sektor-sektor umum saja, seperti penegakan hukum, dan fasilitator (Rustiadi dan Sugimin P, 2007). Jadi keberlanjutan dari Program GPKA tersebut juga berada di tangan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus saling berkerjasama agar Program GPKA berhasil dan tetap berlanjut.

Meskipun Program GPKA ini telah ada sejak tahun 2003 tetapi pada pertengahan perkembangannya mengalami kefakuman karena ada beberapa kendala. Hal ini disebabkan antara lain oleh ketidakaktifan petani dalam mengikuti penyuluhan yang disampaikan oleh PPL, ada juga yang hanya sekedar datang dan mendengarkan saja tanpa ada tindakan sehingga tidak semua petani mengetahui dan melaksanakan program tersebut.

#### **Pentahapan Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali**

Terbentuknya/terpilihnya suatu daerah sebagai kawasan agropolitan melalui beberapa tahap. Pentahapan pengembangan kawasan agropolitan dimulai dengan menyusun *Master Plan* terlebih dahulu. Menurut Deni (2009) *Master Plan* digunakan sebagai acuan penyusunan program pengembangan kawasan agropolitan.

Di dalam *Master Plan* berisi konsep rencana kawasan agropolitan yang terpilih (misalnya mengenai : kebijakan penetapan kawasan, kajian teori tentang pengembangan kawasan, dan penetapan sarana prasarana pada kawasan yang terpilih). Tahap berikutnya adalah penyusunan RPJM (Rencana Program Jangka Menengah), yang berisi rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan RPJM adalah (a) mempercepat tercapainya pengembangan kawasan agropolitan, (b) memberdayakan masyarakat dalam penyusunan program dan rencana kegiatan melalui berbagai pertemuan sosialisasi dan konsultasi bersama pelaku agribisnis beserta anggota Pokja (kelompok kerja) Kabupaten (RPJM Kabupaten Boyolali, 2006).

RPJM dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Boyolali dibedakan menjadi dua yaitu fisik/konstruksi dan non fisik. RPJM tersebut juga dijadikan sebagai acuan untuk menentukan target dalam melaksanakan Program GPKA. Adapun target dalam pelaksanaan Program GPKA dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Target Program GPKA di Kabupaten Boyolali Tahun 2006

No	Jenis Bantuan	Target	Lokasi	Realisasi
<b>A. Fisik/Konstruksi</b>				
1.	Bantuan alsintan - <i>Handtraktor</i> - Pompa air - <i>Sprayer</i>	4 Buah 12 Buah 60 Buah	Kec.Ampel dan Kec. Boyolali	Sudah sesuai dengan target
2.	Bantuan bibit salak pondoh	1000 batang	20 desa di Kec. Ampel	Baru 11 desa yang diberi bantuan karena bantuan diberikan secara bergilir
3.	Bantuan bibit durian	1000 batang	Kec.Ampel dan Kec. Boyolali	Kec.Ampel hanya 5 desa, Kec.Boyolali hanya 5 desa karena bantuan diberikan secara bergilir
4.	Bantuan peralatan pengolahan pasca panen - <i>Vacuum friying</i> - Alat iris jahe - Alat perajang singkong/ criping	2 Buah 4 Buah 5 Buah	Kec.Ampel dan Kec. Boyolali	<i>Vacuum friying</i> baru diusahakan 1 buah (di Kec.Ampel), alat iris jahe baru 2 buah, dan perajang singkong baru 3 buah (di Kec.Ampel dan Boyolali)
5.	Pembangunan jalan untuk usahatani	1 Paket	Kec.Ampel dan Kec. Boyolali	Belum sesuai dengan target

<b>B. Non Fisik</b>			
1.	Pelatihan dan revitalisasi kelompok tani	Seluruh kelp.tani di Kec. Ampel dan Kec. Boyolali	Kec.Ampel dan Kec. Boyolali Baru dilaksanakan sebanyak 150 kelp. tani di Kec. Ampel dan Boyolali karena kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap
2.	Pelatihan pembuatan kripik nangka	Seluruh kelp.tani di Kec. Ampel dan Kec. Boyolali	Kec. Ampel Baru dilaksanakan di Kec. Ampel karena Kec. Ampel ditunjuk sebagai contoh

Sumber : Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Tabel 11 untuk jenis bantuan alsintan (*handtraktor, sprayer, pompa air, dan lain-lain*) dapat dikatakan sudah sesuai dengan target. Bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing ketua kelompok tani yang ada di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali. Sedangkan bantuan untuk pembangunan jalan untuk usahatani belum sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan proses pembangunan jalan tersebut membutuhkan tenaga kerja dan biaya yang cukup banyak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Akan tetapi pada tahun 2009 proses pembangunannya sudah hampir selesai.

Setelah penyusunan RPJM, tahap terakhir yang ditempuh dalam pengembangan kawasan agropolitan ialah pembentukan DED (*Detail Engineering Design*). DED merupakan disain rincian teknis atau teknis pelaksanaan dari program tersebut. Program GPKA akan berjalan lancar apabila teknis pelaksanaannya jelas.

Isi dari DED tersebut antara lain

- a. Gambaran umum kegiatan yang akan dilakukan
- b. Rancangan Anggaran Biaya

- c. Syarat–syarat pembangunan gedung, meliputi : syarat umum, syarat administrasi , dan syarat teknis

Menurut Bp. Ir. Tri Hartoyo selaku tim Pembina Program GPKA menuturkan:

*“Setelah DED dibuat kemudian ditenderkan kepada pihak lain yang bersedia baru diperiksa oleh pusat, diserahkan dan dikelola bersama dengan petani dan pihak terkait.”*  
(Wawancara tanggal 31 Desember 2008).

Menurut Deni (2008) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Program GPKA meliputi :

- a. Penyiapan *Master Plan* kawasan agropolitan
- b. Dukungan sarana dan prasarana
- c. Pendampingan pelaksanaan program

Masyarakat dalam hal ini petani ditempatkan sebagai pelaku utama, pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan sehingga mendapatkan keberhasilan yang lebih optimal. Pada tahap akhir peran pemerintah dikurangi, semuanya diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan pendampingan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelatihan.

- d. Pembiayaan Program GPKA

Pembiayaan Program GPKA ada yang dilakukan oleh masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah yaitu melalui dana stimultans/APBD. Dana yang berasal dari APBD tersebut ditangani oleh dinas terkait.

### **Keanggotaan Tim Pembina Program Gerakan Pengembangan Kawasan Aropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali**

Pembentukan tim pembina dalam Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) sangatlah penting guna menunjang keberhasilan Program GPKA. Tim Pembina ini dibentuk pada tahun 2008 yang dibedakan menjadi dua yaitu dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Tim Pembina tersebut sama-sama berperan penting dan

harus saling bekerjasama agar Program GPKA terlaksana dengan baik. Susunan keanggotaan tim Pembina Program GPKA dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Susunan Tim Pembina Program GPKA di Kabupaten Boyolali Tahun 2008

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
<b>TINGKAT KABUPATEN</b>		
1.	Bupati Boyolali	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Boyolali	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boyolali	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kab. Boyolali	Ketua
5.	Kepala Bappeda Kab. Boyolali	Wakil Ketua
6.	Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Boyolali	Sekretaris
7.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Boyolali	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Boyolali	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Pertambangan dan Kebersihan Kab. Boyolali	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boyolali	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kab. Boyolali	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Boyolali	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali	Anggota
14.	Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boyolali	Anggota
16.	Kepala Badan Lingk Hidup Kab. Boyolali	Anggota
17.	Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kab. Boyolali	Anggota
<b>TINGKAT KECAMATAN</b>		
1.	Camat	Ketua
2.	Kepala UPT DISPERTANBUNHUT yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan	Sekretaris
3.	Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perikanan yang berwilayah kerja di kec. bersangkutan	Anggota
4.	Kepala UPT DPUPPK yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Bupati Boyolali

Tim Pembina Program GPKA di Kabupaten Boyolali di tingkat kabupaten tidak seluruhnya berperan aktif terhadap perkembangan Program GPKA. Adapun tim pembina yang aktif antara lain Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Boyolali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Kebersihan Kab. Boyolali, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kab. Boyolali, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali, Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali, Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kab. Boyolali, Kepala UPT DISPERTANBUNHUT yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan, Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perikanan yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan, serta Kepala UPT DPUPPK yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan selebihnya tim Pembina tidak aktif. Dalam hal ini tim pembina di tingkat kecamatan lebih aktif daripada di tingkat kabupaten karena tingkat kabupaten menyerahkannya kepada tingkat kecamatan dan sering berhubungan langsung dengan para petani. Tetapi dalam melaksanakannya tingkat kabupaten perlu mengetahuinya.

Menurut keterangan dari Bp. Tri Hartoyo :

*“Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kab. Boyolali dan camat selaku ketua tim Pembina bertugas untuk menggerakkan dan memantau para anggota dalam melaksanakan program. Dinas Pertanian bertugas untuk mengusahakan peningkatan mutu dan produk hasil pertanian, DPUK dari Bina Warga bertugas untuk membina jalan-jalan dan saluran irigasi agar lancar, Dinas Pendidikan bertugas untuk melaksanakan pendidikan, penyuluhan, Dinas Operasi dan UKM bertugas untuk membina kelompok tani, penyediaan modal usaha, memfasilitasi kredit, Dinas Kesehatan bertugas untuk mengusahakan kesehatan, bagaimana agar rumah tangga tani bersih dan sehat, dan Cipta karya bertugas untuk memberi ijin untuk pengembangan industri rumah tangga petani.”* (Wawancara tanggal 24 Maret 2009).



Menurut John Hamenda (2003) dalam pengembangan kawasan agropolitan terdapat 3 hal penting yang menjadi syarat agar konsep pengembangan kawasan agropolitan dapat diwujudkan, yaitu:

**a. Investasi dalam bidang agroindustri**

Kawasan atau daerah yang disebut sebagai daerah agropolitan yang berbasis komoditas unggulan adalah suatu daerah yang bertumpu dari hasil pertanian dan memiliki komoditas unggulan. Daerah tersebut tidak saja menjadi pemasok dari komoditas unggulan yang dihasilkan, tetapi juga menghasilkan sesuatu produk olahan dari produksi pertanian yang siap dipasarkan dan menjadi ciri khas daerahnya.

Investasi dalam bidang agroindustri berupa bibit/benih buah-buahan dan sayuran, obat-obatan serta modal kelompok. Banyaknya jumlah bibit/benih dan obat-obatan yang diberikan sebagai berikut

**Tabel 13 Jenis Investasi dalam Bidang Agroindustri Tahun 2007**

Lokasi	Bibit/benih buah-buahan	Bibit/benih sayuran	Obat-obatan
Kec.Ampel	a. Bibit salak pondoh (3.450 batang)	a. Benih cabe hibrida (140 Gr)	a. Deltametrin (10 liter)
	b. Bibit jeruk keprok (2.580 batang)	b. Benih tomat hibrida (240 Gr)	b. Profenofos (5 liter)
	c. Bibit jeruk purut (360 batang)	c. Benih jagung hibrida (985 Kg)	c. Lampda sihalotrin (20 liter)
	d. Bibit pisang (2.960 batang)	d. Benih kol daun (1.080 Gr)	
	e. Bibit pepaya (910 batang)	e. Benih kol bunga (2.430 Gr)	
	f. Bibit Strawberry (1.780 batang)	f. Benih brokoli (1.520 Gr)	
Kec.Boyolali	a. Bibit pisang (300 batang)	-	Karbofuran (5 liter)
	b. Bibit papaya		

(770 batang)

---

Sumber : Laporan Akhir Seksi Angrobisnis

Berdasarkan Tabel 13 jenis investasi dalam bidang agrobisnis baik yang berupa bibit/benih buah-buahan dan sayuran maupun obat-obatan telah diberikan kepada petani. Namun pemberian bantuan tersebut dilakukan secara bergilir dan diusahakan seluruh petani memperoleh.

Produksi buah-buahan terbanyak yang ada di Kecamatan Ampel pada tahun 2008 yaitu durian (8.000 Kw/tahun), alpukat (2.000 Kw/tahun) dan pisang (2.000 Kw/tahun). Sedangkan produksi tanaman sayuran adalah petai (1.500 Kw/tahun) (DISPERTANBUNHUT, 2008).

Menurut Bapak Soemin selaku koordinator BPP Ampel mengemukakan bahwa

*“Tanaman sayuran yang diusahakan oleh petani dibedakan menjadi dua yaitu tanaman dataran tinggi dan dataran rendah. Tanaman dataran tinggi misalnya kol, slobor, dan wortel yang mayoritas terdapat di Desa Candisari, Kembang, dan Ngagrong . Sedangkan tanaman dataran rendah misalnya seledri dan terong yang mayoritas terdapat di Desa Urutsewu, Ngenden, dan Ngampon.”*  
(Wawancara tanggal 16 Mei 2009).

Selain tanaman sayuran dan buah-buahan, di Kecamatan Ampel juga memiliki produk olahan unggulan yaitu abon/dendeng. Abon/dendeng tersebut menjadi ciri khas di Kecamatan Ampel dan didukung oleh beberapa UPTD TPH (Tempat Pemotongan Hewan). Produk tersebut terbuat dari daging sapi dan sudah dikenal oleh masyarakat sampai ke pelosok desa bahkan juga dipasarkan di kota-kota besar seperti Semarang, Madiun, dan Jakarta.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Soemin berikut

*“Kecamatan Ampel terkenal dengan abon/dendengnya dan punya beberapa UPTD TPH (Tempat Pemotongan Hewan). Produk tersebut bahkan sudah dipasarkan sampai ke kota-kota besar seperti Semarang, Madiun, dan Jakarta.”*  
(Wawancara tanggal 16 Mei 2009).

Produk olahan lain yang diusahakan di Kecamatan Ampel antara lain kripik. Kripik tersebut bermacam-macam, ada yang terbuat dari jamur, singkong, dan dari produk pertanian lainnya.

Sama halnya di Kecamatan Ampel, di Kecamatan Boyolali juga memiliki produksi buah-buahan dan sayuran. Produksi buah-buahan yang ada di Kecamatan Boyolali pada tahun 2008 yaitu mangga (2.050 Kw/tahun), sukun (1.087 Kw/tahun), dan pepaya (1.040 Kw/tahun) dan untuk tanaman sayurannya adalah melinjo sebanyak 14,549 Kw/tahun (DISPERTANBUNHUT, 2008).

Produk unggulan yang diusahakan di Kecamatan Boyolali adalah susu. Produk tersebut dapat diperoleh dari peternak sapi setempat dan umumnya dipasarkan dalam bentuk susu segar. Oleh sebab itu, Kecamatan Boyolali terkenal dengan “susu segar khas Boyolali”. Daerah pemasaran hanya di daerah sekitar Solo-Boyolali karena dikhawatirkan apabila diluar daerah tersebut susu akan basi sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

Investasi dalam bidang agroindustri yang berupa modal kelompok dapat diperoleh dari kas kelompok tani/GAPOKTAN atau meminjam di bank/lembaga keuangan lain (misalnya koperasi), sedangkan investasi berupa alsintan dapat diperoleh dari dinas terkait. Adapun jenis bank dan lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Ampel dan Boyolali antara lain BRI, BPR, BKK, BNI, Danamon, LIPPO, BCA, PANIN, dan Koperasi.

#### **b. Promosi Produk Unggulan**

Promosi produk unggulan dari suatu kawasan akan menentukan keberhasilan pengembangan daerah agropolitan yang bersangkutan. Promosi produk unggulan dapat dilakukan dengan memperkenalkan produk tersebut pada saat ada pertemuan kelompok/arisan, ada tamu undangan yang hadir, atau dijual keluar daerah, dan lain-lain.

### **c. Pengelolaan Agrikultura dan Industri yang Berkesinambungan**

Pengelolaan agrikultura dan industri sudah sewajarnya berjalan berkesinambungan. Kawasan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai kawasan agropolitan perlu dibangun sebuah industri sebagai faktor pendukungnya. Industri yang dibangun tersebut menggunakan bahan baku/material dari produk pertanian. Material yang ada di daerah tersebut akan diserap oleh industri secara berkesinambungan dan diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan dari kawasan itu. Dengan adanya produk unggulan tersebut pada akhirnya masyarakat petani akan menikmati kesejahteraan sebagai dampak pembangunan.

## **B. Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA)**

### **1. Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel**

Sosialisasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam mensukseskan suatu program. Hal ini penting karena sosialisasi merupakan upaya memperkenalkan atau menyebarkan informasi mengenai Program GPKA kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung (Depdagri, 2005).

Tujuan yang hendak dicapai dalam sosialisasi adalah (a) agar masyarakat memahami proses kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana melalui tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan tindak lanjut dari Program GPKA, (b) masyarakat dapat memahami secara umum permasalahan kegiatan agribisnis yang terjadi di kawasan agropolitan dan khususnya di lingkungannya.

Sama halnya dengan program-program pemerintah yang lain, pada program “rintisan agropolitan” juga perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar semua petani dan masyarakat dapat mengetahui program tersebut. Adapun pelaksanaan sosialisasi tersebut meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan.

a. Penyuluhan

Untuk pertama kalinya kegiatan penyuluhan tentang Program GPKA dilaksanakan di BPP Ampel dengan sasaran seluruh kelompok tani yang tergolong dalam Program GPKA. Sebagai nara sumbernya adalah dari DISPERTANBUNHUT yang kebetulan ditunjuk sebagai pihak konsultan dan Kantor Ketahanan Pangan serta mengundang kepala desa masing-masing kecamatan yang tergolong dalam GOASEBO, camat masing-masing kecamatan yang tergolong dalam GOASEBO, dan perwakilan dari pelaku agribisnis (pedagang).

Materi yang pertama kali disampaikan kepada sasaran adalah perkenalan dan penjelasan terlebih dahulu tentang Program GPKA. Hal ini sifatnya *permission* atau meminta ijin kepada warga setempat dengan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan program, misalnya tujuan, lingkup kegiatan, dan manfaat bagi warga setempat.

Pihak konsultan menyiapkan bahan presentasi berupa usulan indikasi program yang masih bersifat umum dimana indikasi program tersebut merupakan *output* dari kegiatan *Master Plan*. Dalam kegiatan penyuluhan tersebut konsultan menggunakan media bantu berupa laptop, LCD, serta dilengkapi dengan peta ukuran besar (A2) selain itu konsultan juga membagikan kuisisioner yang berisi tentang permintaan usulan-usulan program pembangunan sarana dan prasarana kawasan agropolitan. Hasil yang diharapkan dari kuisisioner tersebut adalah mendapatkan masukan/usulan yang sebanyak-banyaknya mengenai kebutuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia atau memerlukan perbaikan maupun perawatan.

Materi penyuluhan yang selanjutnya ialah penjelasan tentang pemberdayaan yang disampaikan oleh Bapak Tri Hartoyo (perwakilan dari Kantor Ketahanan Pangan). Pemberdayaan merupakan kegiatan identifikasi terhadap tindakan pemberdayaan yang perlu dilaksanakan untuk menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya

adalah penentuan visi dan misinya. Selain itu juga dilakukan diskusi/tukar informasi guna mendapatkan masukan/ide tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, serta dilakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk memperoleh umpan balik/tanggapan.

Pada tahun 2008 kegiatan sosialisasi ini mulai dilaksanakan kembali guna mengingatkan para petani tentang Program GPKA karena pada tahun 2006-2007 sempat mengalami kevakuman. Pelaksanaannya masih sama yaitu melalui penyuluhan. Materi penyuluhan yang disampaikan mengenai revitalisasi kelompok tani. Revitalisasi kelompok tani merupakan proses/upaya untuk mengaktifkan kembali kelompok tani, yang sebelumnya masih pasif diharapkan agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani. Materi yang diberikan pada saat kegiatan tersebut antara lain tentang peningkatan kemampuan kelompok tani, wilayah kerja (wilker), kepengurusan dan keanggotaannya disertai dengan diskusi.

Pada kegiatan penyuluhan ini dinas terkait juga berencana untuk memberikan bantuan berupa bibit/benih buah-buahan (salak pondoh, durian, pisang, dan lain-lain) dan sayuran (jagung, kacang tanah, dan lain-lain), bantuan obat-obatan, alsintan, serta alat pengolahan pasca panen. Banyaknya bantuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok tani yang akan diserahkan bersamaan dengan pelatihan secara bergilir.

b. Pelatihan dan pendampingan

Kegiatan pelatihan ini mulai dilakukan pada tahun 2008 setelah wilayah yang bersangkutan mendapat penyuluhan dari dinas terkait. Pelatihan yang dilakukan disini antara lain pelatihan penguatan modal kelompok, pelatihan pengolahan pasca panen. Sedangkan pendampingan dilakukan bersamaan dengan pelatihan.

Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Kegiatan ini dilaksanakan di BPP Ampel. Peserta yang hadir berasal dari ketua kelompok tani/yang mewakili masing-masing desa dan perangkat desa.

Materi yang dipelajari mengenai ciri, fungsi, dasar penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, kemitraan, serta asosiasi petani. Sebagai pemateri/nara sumber yaitu dari Kantor Ketahanan Pangan dan UPT DISPERTANBUNHUT. Adapun alat Bantu yang digunakan adalah LCD, *note book*, dan ATK (Alat Tulis Kantor).

Hasil setelah adanya pelatihan tersebut adalah peserta termotivasi untuk membina kelompok taninya dengan cara meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok tani, meningkatkan kegiatan pertemuan rutin/insidental kelompok tani, dan berkembangnya unit usaha yang dikembangkan oleh anggota kelompok tani, misalnya koperasi.

#### Pelatihan pengolahan pasca panen

Kegiatan ini dilaksanakan di BPP Ampel. Peserta yang hadir berasal dari ketua kelompok tani/wanita tani pelaku industri rumah tangga. Materi yang disampaikan mengenai pengolahan hasil pertanian, teori dan praktek pembuatan kripik dari buah nangka. Sebagai pemateri/nara sumber berasal dari Kantor Ketahanan Pangan dan SMKN 1 Mojosongo, Boyolali.

Alat bantu yang digunakan adalah LCD, *note book*, ATK (Alat Tulis Kantor), dan alat mesin pengolahan hasil pertanian. Pemakaian alat mesin tersebut secara bergantian yakni memberi kesempatan kepada semua warga desa yang ingin mengembangkan usaha, baik individu maupun kelompok. Peminjaman ini tanpa dipungut biaya dan untuk pemeliharaan alat mesin tersebut untuk sementara waktu diserahkan kepada Kepala Desa Candi dan apabila ada kerusakan ditanggung bersama oleh kelompok tani. Apabila kerusakannya tidak terlalu parah maka hanya diperbaiki sendiri agar tidak menghabiskan biaya yang banyak atau menghubungi teknisi untuk memperbaikinya apabila memang diperlukan (Kantor Ketahanan Pangan Boyolali, 2008).

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah berkembangnya usaha pengolahan pasca panen hasil pertanian terutama oleh kelompok wanita tani pelaku industri rumah tangga. Meskipun yang dipraktekkan dalam kegiatan tersebut hanya terbatas pada pembuatan kripik dari nangka saja tetapi diharapkan para petani dapat melakukan praktek pengolahan pasca panen untuk jenis komoditas yang lain. Misalnya kripik dari salak, nanas ataupun buah-buahan lain yang memiliki kadar air cukup tinggi.

Cara untuk menentukan suhu/temperatur yang tepat dalam pengolahan hasil pertanian tersebut masih menjadi kendala sampai saat ini. Kendala ini disebabkan karena kelompok wanita tani sebagian besar belum mampu mengoperasikan alat tersebut dengan baik. Hal ini mengakibatkan kenampakan dari hasil pertanian yang telah diolah tersebut kurang menarik (terlihat gosong) sehingga daya jualnya rendah meskipun rasanya enak.

Kegiatan pengolahan pasca panen tersebut apabila ditindak lanjuti dengan serius maka dapat memberikan *omsite*/pemasukan yang baik bagi kelompok wanita tani dan masyarakat sekitar. Hasilnya nanti selain dapat menambah ketrampilan dan kreatifitas petani khususnya kelompok wanita tani pelaku industri rumah tangga juga dapat menambah pendapatan keluarga.

Menurut penuturan Ibu Melati selaku ketua UPPKS Desa Candi Kecamatan Ampel:

*“Praktek pembuatan kripik nangka hasilnya belum seperti yang diharapkan karena temperatur yang digunakan belum tepat. Nangkanya terlihat gosong sehingga kurang menarik kalau dijual padahal rasanya enak.”* (Wawancara tanggal 18 April 2009).

## **2. Hasil Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel**

Hasil yang dicapai dalam kegiatan sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel adalah sebagai berikut

- a. Secara teknis: adanya umpan balik atau respon dari peserta sosialisasi khususnya petani terhadap permasalahan yang terkait dengan Program



GPKA. Misalnya permasalahan tentang kurangnya sarana prasarana pertanian. Petani mengusulkan kepada dinas terkait agar jumlah *hand traktor* perlu ditambah agar dapat mempercepat proses pengolahan tanah.

Semua masukan/saran dari peserta sosialisasi yang lain ditampung oleh dinas terkait dan dinas terkait berusaha untuk memenuhi keinginan dari peserta tersebut.

- b. Secara psikologis: pemahaman petani terhadap sosialisasi Program GPKA dapat dikatakan baik. Hal ini berarti bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dapat menambah pengetahuan petani. Dengan bertambahnya pengetahuan petani maka dapat membantu terlaksananya Program GPKA.
- c. Secara kuantitas: jumlah kelompok tani yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Program GPKA sebanyak 200 kelompok tani. Hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh petani aktif dalam melaksanakan GPKA.

### **3. Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali**

Sosialisasi merupakan kegiatan penyiapan masyarakat terutama tentang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan melalui rebug warga sehingga masyarakat memahami dan dapat terlibat secara aktif. Terlaksananya suatu program, dalam hal ini Program GPKA tidaklah muncul dengan sendirinya melainkan ada hal yang melatarbelakanginya.

Pada dasarnya kegiatan sosialisasi di Kecamatan Boyolali tidak jauh berbeda dengan sosialisasi di Kecamatan Ampel. Adapun hal yang melatarbelakangi perlu diadakannya kegiatan sosialisasi Program GPKA menurut penuturan Bp. Eko AS adalah

*“Karena terjadi perubahan paradigma pembangunan, maka sosialisasi mutlak diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan menyadari dan memahami serta mau berperan serta secara*

*dinamis dalam pengembangan kawasan agropolitan.”*  
(Wawancara tanggal 30 Desember 2008).

Melalui tahap sosialisasi ini, segala kegiatan yang terinci dalam rencana program, kebijakan yang akan dihasilkan, disampaikan oleh konsultan perencana secara terarah dan sistematis. Masyarakat perlu mengetahui keberadaan dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah karena secara langsung maupun tidak langsung masyarakat terlibat didalamnya atau sebagai pelaksananya. Dalam penelitian ini informasi tentang keberadaan Program GPKA diperoleh dari Kantor Ketahanan Pangan. Kantor Ketahanan Pangan sebagai motivator sekaligus fasilitator bagi para petani dalam melaksanakan program tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari Program GPKA tergantung pada usaha yang dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan yang tentunya didukung oleh peran aktif dinas terkait dan para petani sendiri.

Proses pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Boyolali sama dengan sosialisasi di Kecamatan Ampel, yaitu meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Seperti yang diungkapkan oleh Bp. Darsono, *“Sosialisasinya dengan melalui penyuluhan yang dilakukan oleh PPL.”* (Wawancara tanggal 16 Januari 2009).

Hal ini dipertegas lagi oleh Bp. Eko AS bahwa: *“Sosialisasi dilakukan dengan penyuluhan, pendampingan maupun pelatihan.”* (Wawancara tanggal 31 Desember 2008).

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kelanjutan dari penyuluhan sebelumnya yang diselenggarakan di BPP Ampel melalui koordinasi dengan perangkat kecamatan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan agribisnis. Akan tetapi penyuluhan kali ini dilaksanakan di Balai Desa Kecamatan Boyolali. Sebagai nara sumbernya adalah dari DISPERTANBUNHUT dan Kantor Ketahanan

Pangan serta mengundang kepala desa Kecamatan Boyolali, dan Camat Boyolali.

Media Bantu yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah *white bord*, spidol, *microphone*, tape, dan ATK. Materi yang disampaikan menyangkut tentang pembinaan kelompok tani.

Materi pembinaan kelompok tani ini tidak cukup hanya dengan diskusi saja tetapi ditindak lanjuti dengan peran aktif dari para anggota kelompok tani. Misalnya dalam pemakaian alsintan dan kegiatan kerja bakti membangun saluran air. Apabila anggota kelompok tani ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pembinaan kelompok tani berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Setelah materi tersebut selesai dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Kegiatan tersebut membahas tentang rencana kerja maupun hal teknis lapangan yang akan dilakukan kedepannya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terkoordinasinya pengembangan kawasan agropolitan, baik fisik maupun non fisik, koordinasi vertikal maupun horizontal. Koordinasi vertikal misalnya koordinasi dengan dinas di tingkat atas (kabupaten) sedangkan koordinasi horizontal misalnya koordinasi dengan tingkat yang sama (sesama petani).

Pada kegiatan penyuluhan ini dinas terkait juga berencana untuk memberikan bantuan berupa bibit/benih buah-buahan (pisang, kelapa, dan lain-lain) dan sayuran (jagung, kacang tanah, dan lain-lain), bantuan obat-obatan, alsintan, serta alat pengolahan pasca panen. Banyaknya bantuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok tani yang akan diserahkan bersamaan dengan pelatihan secara bergilir.

Sayangnya respon peserta dalam kegiatan penyuluhan ini kurang baik karena peserta tidak begitu antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan. Beberapa peserta yang hadir tidak begitu mengetahui tentang Program GPKA. Yang terpenting menurut peserta adalah

Program GPKA tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan usahataninya.

b. Pelatihan dan pendampingan

Pelatihan merupakan salah satu usaha tindak lanjut yang dilaksanakan setelah wilayah yang bersangkutan mendapatkan penyuluhan. Sedangkan pendampingan dilakukan bersamaan dengan pelatihan.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Balai Desa Kecamatan Boyolali. Nara sumbernya adalah ibu Sukarni selaku PPL Boyolali dibantu oleh PPL yang lain dan Bapak Tri Hartoyo selaku staf di Kantor Ketahanan Pangan. Alat bantu yang digunakan yaitu alat perajang criping/ubi kayu. Sasaran pelatihan ini adalah dikhususnya pada wanita, baik wanita tani maupun ibu rumah tangga.

Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan usaha pengolahan hasil pertanian. Dalam hal ini hasil pertanian yang akan diolah adalah criping/ubi kayu yaitu diolah menjadi kripik. Para peserta pelatihan mempraktekkan sendiri apa yang diperintahkan oleh demonstrator sehingga dapat mengetahui sejauhmana kemampuan yang ia miliki. Yang ditunjuk sebagai demonstrator dalam pelatihan ini adalah ibu Sukarni selaku PPL Boyolali.

#### **4. Hasil Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali**

Hasil yang dicapai dalam kegiatan sosialisasi GPKA di Kecamatan Boyolali adalah sebagai berikut:

- a. Secara teknis: kurangnya umpan balik atau respon dari peserta sosialisasi terhadap permasalahan yang ada. Peserta cenderung bersikap pasif, tidak begitu antusias dalam mengikuti sosialisasi karena pada saat diadakan sosialisasi yang pertama kali, ada yang tidak hadir sehingga informasi yang diperoleh kurang.
- b. Secara psikologis: pemahaman petani terhadap sosialisasi Program GPKA dapat dikatakan kurang baik. Hal ini berarti bahwa sosialisasi

yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan belum tepat sasaran. Akan tetapi kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan petani.

- c. Secara kuantitas: jumlah kelompok tani yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Program GPKA sebanyak 50 kelompok tani. Kelompok tani di Kecamatan Boyolali memang lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan Kecamatan Ampel sehingga jumlah petani yang aktifpun juga lebih sedikit.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait tentang kegiatan sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel dan Boyolali, menurut peneliti sosialisasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ampel dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Boyolali. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya respon/umpan balik dari petani dan jumlah kelompok tani yang aktif dalam kegiatan. Selain itu, Kecamatan Ampel lebih luas sehingga memungkinkan petani untuk mengembangkan kawasan agropolitan. Sebaiknya setiap kali ada pertemuan, perlu dibahas tentang keberlanjutan program tersebut agar dapat diketahui sampai sejauhmana pelaksanaannya di lapang.

Sebenarnya Program GPKA ini juga berperan untuk meningkatkan bidang pertanian yang ada di Indonesia dan apabila dikelola dengan baik maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagaimana yang tertuang dalam kerangka berpikir bahwa tujuan Program GPKA adalah adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, namun pada kenyataannya hasilnya belum maksimal karena peningkatan pendapatan dan kesejahteraan belum terlihat secara nyata.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bp. Parno selaku ketua Gapoktan Desa Mudal bahwa :

*“Peningkatan ekonomi (pendapatan) petani setelah memperoleh sosialisasi tentang Program GPKA kurang begitu mencolok, justru yang lebih terlihat adalah pengetahuannya.”*  
(Wawancara tanggal 13 Februari 2009).

## **C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA)**

### **1. Kendala Sosialisasi di Kecamatan Ampel**

Segala macam bentuk kegiatan yang dalam hal ini adalah Program GPKA dapat menemui kendala. Hal ini dapat terjadi karena kondisi lapang yang terkadang kurang bersahabat, tidak sama dengan yang dibayangkan sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh para petani maupun dinas terkait dalam mensosialisasikan/melaksanakan Program GPKA di Kecamatan Ampel adalah:

#### **a. Terbatasnya jumlah personil yang dilibatkan dalam program**

Keterbatasan jumlah personil/tim yang dilibatkan dalam mensosialisasikan Program GPKA merupakan salah satu kendala terhambatnya pelaksanaan program. Dalam hal ini personil/tim yang ditunjuk hanya berasal dari tingkat kabupaten dan kecamatan saja. Seharusnya tingkat daerah (seperti PPL) juga dilibatkan dalam perencanaan program karena tingkat daerah berperan sebagai penyalur informasi antara dinas terkait dengan petani dan secara tidak langsung juga sebagai pelaksana dari Program GPKA sehingga perlu mengetahui tentang program tersebut.

Untuk tingkat kabupaten yang mengetahui tentang Program GPKA adalah kepala dinas DISPERTANBUNHUT yaitu Bp. Eko selaku informan dalam penelitian ini. Di tingkat kecamatan yang mengetahui program tersebut antara lain camat dan kepala UPT DISPERTANBUNHUT yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan. Sedangkan untuk staf yang lain kurang begitu memahami karena mereka memiliki tugas yang berbeda-beda tidak hanya menangani tentang Program GPKA saja.

b. Ketersediaan Dana untuk sosialisasi Program GPKA

Ketersediaan dana merupakan aspek penting dalam mensosialisasikan Program GPKA. Hal ini dianggap penting karena untuk mensosialisasikan suatu program dibutuhkan sejumlah dana tertentu agar program dapat berjalan dengan lancar. Apalagi jenis kegiatan yang termasuk dalam Program GPKA tidaklah sedikit sehingga membutuhkan dana dalam jumlah banyak.

Pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk kebutuhan Program GPKA. Misalnya dana untuk kegiatan penyuluhan dalam rangka sosialisasi Program GPKA. Untuk mengadakan penyuluhan pasti mengundang kelompok tani dan dinas terkait serta membutuhkan alat tulis kantor, LCD, leaflet, konsumsi, dan lain-lain. Apabila dana yang diberikan kurang maka petugas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan terpaksa menggunakan dana mereka sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Bp. Soemin selaku koordinator BPP Ampel berikut:

*“Bila dana yang diberikan oleh pemerintah untuk GPKA kurang maka kami biasanya menggunakan uang sendiri/iuran bersama/patungan.”* (Wawancara tanggal 7 Januari 2009).

c. Aktivitas petani

Aktivitas para petani selaku sasaran dalam Program GPKA terkadang dapat menjadikan suatu kendala. Hal ini karena aktivitas dari tiap-tiap petani berbeda-beda sehingga pertemuan antara petani dengan dinas terkait perlu dijadwalkan terlebih dahulu.

Aktivitas petani ini terkadang tidak dapat diduga. Misalnya sakit, ada keperluan keluarga, dan lain-lain. Penetapan waktu pertemuan sebaiknya disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara petani dengan dinas terkait. Pertemuan dapat dilakukan di tempat tinggal petani maupun di BPP atau balai desa di masing-masing kecamatan yang bersangkutan.

## **2. Kendala Sosialisasi di Kecamatan Boyolali**

Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ampel, di Kecamatan Boyolali juga mengalami kendala dalam mensosialisasikan/melaksanakan Program GPKA. Adapun kendalanya antara lain:

### **a. Adanya mutasi dan penggantian salah satu staf Seksi Agribisnis**

Hal ini merupakan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan Program GPKA. Adanya mutasi ini terjadi pada saat Kasi Agribisnis sedang mengikuti Diklat Pim IV di Donohudan Kecamatan Ngemplak pada bulan Agustus 2007. Padahal pada bulan tersebut Program GPKA sedang berjalan yaitu pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik (pemberian bantuan bibit/benih dan pemberian bantuan obat-obatan/pupuk kepada petani) dan non fisik (revitalisasi kelompok tani dan koordinasi dengan dinas terkait tentang Program GPKA).

Meskipun posisi staf yang di mutasi telah diganti oleh staf yang baru namun staf yang baru tersebut kurang memahami tentang Program GPKA sehingga perkembangan dari Program GPKA sempat terhambat/fakum. Adanya mutasi dan penggantian staf ini ditangani oleh TU di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

### **b. Tidak semua petani mengetahui tentang Program GPKA**

Hal ini dikarenakan pada saat diadakan penyuluhan tentang GPKA, petani ada yang tidak hadir karena memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Disisi lain meskipun petani hadir tetapi mereka hanya sekedar mendengarkan saja tanpa ada respon/tindakan pada diri mereka. Misalnya di Desa Penggung, sebagian besar petani tidak mengetahui adanya Program GPKA karena kurangnya informasi diantara para petani dan ada juga petani yang baru bergabung dalam kelompok tani di desa tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sukarni selaku PPL di BPP Kec. Boyolali bahwa:



*“Pada saat ada sosialisasi, tidak semua petani datang sehingga ada yang tidak tahu.”*  
(wawancara tanggal 7 Januari 2009).

Beliau juga menambahkan :

*“Apa yang disuluhkan oleh PPL tidak langsung dijalankan oleh petani.”* (wawancara tanggal 7 Januari 2009).

- c. Petani belum seluruhnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap GPKA

Dukungan kualitas SDM di bidang pertanian di pedesaan sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing di daerah tersebut dengan daerah lain. Menurut Sunarsih dan Ashari (2004) kemampuan anggota masyarakat dalam menghargai tata nilai “maju” dapat dianggap sebagai salah satu ciri penting tingginya kualitas SDM.

Kualitas SDM ini akan mempengaruhi sikap dan pandangan petani terhadap hasil sosialisasi tentang Program GPKA yang mereka terima. Apabila sikap dan pandangan petani tidak sama maka sulit untuk mengajak petani agar mau melaksanakan apa yang disuluhkan oleh PPL.

Seperti yang diungkapkan oleh Bp. Eko AS sebagai berikut:

*“Kendala GPKA adalah belum seluruh petani memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap GPKA. Dalam hal ini kualitas SDM petani akan sangat mempengaruhi penerimaan petani.”*  
(Wawancara tanggal 30 Desember 2008).

#### **D. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA)**

##### **1. Upaya yang dilakukan di Kecamatan Ampel**

- a. Mengkoordinasikan lagi jumlah personil yang akan dilibatkan

Jumlah personil yang dilibatkan diusahakan benar-benar sanggup dan mampu untuk melaksanakan Program GPKA agar program tersebut berjalan lancar sesuai keinginan bersama. Bila perlu menambah jumlah PPL karena jumlah PPL tidak sebanding dengan jumlah kelompok tani yang ada di sana. Jumlah PPL hanya 11 orang sedangkan jumlah kelompok tani 230 kelompok. Sebaiknya di setiap desa terdapat

seorang PPL agar semua kegiatan yang terkait dengan bidang pertanian dapat berjalan lebih efektif.

b. Membuat proposal pelaksanaan Program GPKA

Upaya yang ditempuh oleh dinas terkait dengan cara membuat proposal pelaksanaan Program GPKA diharapkan mendapat persetujuan dari pusat. Di dalam proposal tersebut berisi rincian kegiatan dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan GPKA. Apabila mendapat persetujuan dari tingkat pusat maka dapat mengurangi masalah ketersediaan dana.

Implementasi dalam penggunaan dana tersebut juga harus jelas. Penggunaan dana untuk GPKA diambil dari dana APBN bukan berasal dari dana pribadi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## **2. Upaya yang dilakukan di Kecamatan Boyolali**

Begitu juga di Kecamatan Boyolali untuk mengatasi kendala yang ada, petani maupun dinas terkait menempuh upaya sebagai berikut:

a. Memberi masukan kepada pimpinan agar staf yang bersangkutan ditunda kepindahannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

Upaya tersebut meskipun pernah ditempuh tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimum. Staf tersebut tetap harus pindah karena sudah menjadi keputusan bersama dan mau tidak mau harus menerimanya.

b. Bertukar informasi dengan petani lain apabila ada informasi baru terutama kepada petani yang tidak hadir pada saat penyuluhan

Hal ini perlu dilakukan karena agar semua anggota kelompok tani mengetahui informasi terkait tentang Program GPKA yang dilaksanakan di daerahnya. Apabila informasi tersebut dirasa kurang lengkap maka petani dapat menanyakannya langsung kepada dinas terkait/berkonsultasi dengan PPL. Konsultasi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Misalnya di BPP ataupun datang langsung ke rumah PPL yang bersangkutan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan atau menceritakan permasalahan yang dihadapi terkait tentang usahatani.

c. Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan pendampingan

Koordinasi lintas sektor dan pendampingan perlu lebih diintensifkan agar petani memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap Program GPKA. Dengan begitu para petani akan bersama-sama mensukseskan Program GPKA karena keberhasilan dari program ini berada ditangan dinas terkait dan para petani.

Sesuai dengan penuturan Bp. Eko AS selaku kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Usahatani di DISPERTANBUNHUT sebagai berikut

*“Mengintensifkan koordinasi lintas sektor, pendampingan secara berkelanjutan dan menggalang kemandirian petani.”*  
(Wawancara tanggal 30 Desember 2008).

Hal ini perlu juga dilakukan karena semua sektor yang ada saling terkait, tidak berdiri sendiri meskipun masing–masing sektor memiliki tugas yang berbeda tetapi tidak ada salahnya apabila dilakukan koordinasi lintas sektor dan perlu pendampingan secara berkelanjutan agar dapat memantau sejauh mana keberhasilan dari program tersebut. Apabila para petani mampu mengatasi semua kendala maka keberlanjutan dari Program GPKA dapat diserahkan kepada petani guna menuju kemandirian petani.

Vasey (1992) mengemukakan bahwa bidang pertanian tidak dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak tetapi dapat menyediakan modal bagi pembangunan ekonomi dan memberikan banyak kontribusi untuk pekerjaan secara langsung. Maksudnya bidang pertanian dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan sebagai salah satu modal bagi pembangunan. Penyediaan lapangan pekerjaan sebaiknya disesuaikan dengan pertumbuhan penduduknya agar penduduk tidak banyak yang menganggur.

Menurut Edwards, et al (1993) pertumbuhan penduduk memerlukan pembangunan prasarana yang intensif, khususnya di daerah pedesaan.

Misalnya pembuatan rumah, jalan, sistem komunikasi, fasilitas kesehatan, sumur, dan sekolah.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel dan Boyolali dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan.
2. Kegiatan sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel dan Boyolali ternyata dapat menambah pengetahuan dan pemahaman petani terkait tentang usahatani dan mendapat respon/umpan balik dari para petani.
3. Alat/media bantu yang dipergunakan dalam mensosialisasikan Program GPKA antara lain LCD, *note book*, ATK (Alat Tulis Kantor), laptop, peta, dan leaflet.
4. Kendala yang dihadapi dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel antara lain terbatasnya jumlah personil yang dilibatkan, ketersediaan dana untuk sosialisasi kegiatan Program GPKA, dan aktivitas petani.
5. Kendala yang dihadapi dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali antara lain adanya mutasi salah satu staf Seksi Agribisnis pada saat Kasi Agribisnis sedang mengikuti Diklat Pim IV pada bulan Agustus 2007, tidak semua petani mengetahui tentang Program GPKA karena pada saat diadakan penyuluhan tentang GPKA petani ada yang tidak hadir, dan petani belum seluruhnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap GPKA.
6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel antara lain mengkoordinasikan lagi jumlah personil yang akan dilibatkan, membuat proposal pelaksanaan Program GPKA.
7. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali antara lain memberi masukan kepada pimpinan agar staf yang bersangkutan ditunda kepindahannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, bertukar informasi kepada petani lain

apabila ada informasi baru terutama kepada petani yang tidak hadir pada saat penyuluhan, dan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan pendampingan.

## **B. Saran**

1. Bagi dinas terkait, perlu menambah jumlah personil yang akan dilibatkan dalam mensosialisasikan Program GPKA.
2. Bagi petani, diharapkan selalu aktif dalam mengikuti penyuluhan dan berkonsultasi dengan penyuluh yang ada di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2008. Lompatan Paradigma Program Agropolitan di Indonesia: dari Paradigma Pembangunan Berbasis Manusia menuju Paradikma Modernisasi (Paradigma Jumping). <http://iagusta.blogspot.com/2008/08/lompatan-paradigmatik-program.html>. Diakses tanggal 18 September 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2007. *Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali Dalam Angka Tahun 2007*. Boyolali.
- Brooks, William D. 1971. *Speech Communication*. Brown Company Publishers. The United States of America.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Analisis Data Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Crabtree, Benjamin F dan William L. M. 1992. *Doing Qualitative Research*. Sage. London. New Delhi.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage. London. New Delhi.
- Deni, Ruchyat. 2009. Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam rangka Pengembangan Wilayah. <http://www.Google.pengembangan-kawasan.com>. Diakses tanggal 16 Maret 2009.
- Departemen Dalam Negeri. 2005. *Sosialisasi*. Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 1978. *70 Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia 1908-1978*. BPLPP. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2006. *Rencana Program Jangka Menengah: Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Boyolali*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Boyolali.
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 2008. *Komoditas Sayur-sayuran Kabupaten Boyolali*. Boyolali.
- Edwards, C.A, et al. 1993. *Agriculture and The Environment*. Elsevier. Amsterdam.
- Gumilar, Gumgum. 2008. Sosialisasi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>. Diakses pada tanggal 18 September 2008.
- <http://www.E-dukasi.net>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2009.

- Hamenda, John. 2003. Peranan Investasi dalam Mengembangkan Kawasan Agropolitan yang Berbasis Komoditas. [http://www.pu.go.id/Ditjen\\_kota/BULETIN/EDISI %20 NO.3/ Investasi-Agro.htm](http://www.pu.go.id/Ditjen_kota/BULETIN/EDISI%20NO.3/Investasi-Agro.htm). Diakses tanggal 18 September 2008.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok - pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. UMM Pres. Malang.
- Ihromi, TO. 1993. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali. 2008. *Agropolitan*. Boyolali.
- Kartasapoetra, A.G. 1987. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Maanen, John Van. 1985. *Qualitative Methodology*. Sage. Beverly Hills. London. New Delhi.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mardikano, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Universitas Sebelas Maret Press. Surakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Prosedur Penelitian Penyuluhan Pembangunan*. Prima Theresia Presindo. Surakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Arip Wijianto. 2005. *Metode dan Teknik Penyuluhan*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Sutarni. 1982. *Pengantar Penyuluhan Pertanian*. Hapsara. Surakarta.
- Miles M. B dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. IKAPI. Bandung.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke IV. Rake Sarasin. Jakarta.
- Nasution, S. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. UGM Press. Yogyakarta.



- Poerwandari, Kristi. 2001. *Pendekatan Kualitatif Untuk Perilaku Manusia*. 3 UI. Jakarta.
- Rivai, Deddy Effendi. 2003. Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai Pendekatan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian. Disampaikan dalam *Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702) Program Pasca Sarjana/ S3*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rustiadi, Ernan. 2006. Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. [http:// Jakartalitbang. go. id/ klinikagrobisnis](http://Jakartalitbang.go.id/klinikagrobisnis). Diakses tanggal 18 September 2008.
- \_\_\_\_\_ dan Sugimin Pranoto. 2007. *Agropolitan : Membangun Ekonomi Perdesaan*. Crestpent Press. Bogor.
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yayasan Agroekonomika. Yogyakarta.
- Saptaji, Luki. 2008. Reposisi Peranan Penyuluh di Era Otonomi Daerah. [http:// www. Distanak. Banten. Go.id/ Dinas Pertanian dan Peternakan/ Coretan Pegawai. htm](http://www.Distanak.Banten.Go.id/DinasPertaniandanPeternakan/CoretanPegawai.htm). Diakses tanggal 10 Oktober 2008.
- Solahuddin, Soleh. 1999. *Visi Pembangunan Pertanian*. IPB. Bogor.
- Subdin Bimas Ketahanan Pangan dan Usahatani Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, 2007. *Laporan Akhir Tahun Anggaran 2007 Seksi Agribisnis*. Boyolali.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Andi. Yogyakarta.
- Sunarsih dan Ashari. 2004. *Aspek Kelembagaan dan Aplikasinya dalam Pembangunan Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosek Pertanian dan Badan Litbangtan. Bogor.
- Suprpto, Tommy dan Fahrianoor. 2004. *Komunikasi Penyuluhan dalam Teori dan Praktek*. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta.
- Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. LPP UNS dan UNS Press. Surakarta.
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press. Surakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Edisi ke-2. Universitas Sebalas Maret Surakarta. Surakarta.

- Tjitropranoto, Prabowo dan Mahyuddin Syam. 1989. Development in Procedures for Farming System Research. Dikutip dalam *Proceedings of an International Workshop pada tanggal 13 – 17 Maret 1989*. Bogor.
- Un Habitat, 2009. *Sosialisasi dan Kampanye Penyadaran Publik*. Jakarta.
- Vasey, Daniel E. 1992. *An Ecological History of Agriculture 10.000 B.C. – A.D. 10.000*. Iowa State University Press. Ames.
- Vembriarto, St. 1982. *Sosiologi Pendidikan*. Yayasan Paramita. Yogyakarta.
- Wirartha, I Made. 2005. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Andi. Yogyakarta.
- Yusroni. 2005. *Strategi Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Sosialisasi Berbagai Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Tradisional Di Kota Surakarta*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.